

# KOTAKITA

VOLUME XXV, APRIL 2019

Majalah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia



**Perbaiki Layanan Kesehatan  
Menuai Pro Kontra**

**Mempersiapkan Kota  
Tangguh Bencana**

ANGKAT  
K2  
JADI PMS

**Mempermudah  
Seleksi P3K  
Bagi Tenaga Honorer**



## “Strategi Pembiayaan Infrastruktur di Daerah untuk Mendukung Pengembangan Smart City di Indonesia”

SMART MOBILITY • SMART PEOPLE • SMART LIVING • SMART ECONOMY • SMART ENVIRONMENT • SMART GOVERNMENT



Intertraffic merupakan acara teknologi lalu lintas dan mobilitas cerdas terbesar di Indonesia. Selain teknologi dan solusi internasional yang dipamerkan di area pameran, Intertraffic Indonesia juga akan mendedikasikan rangkaian konferensi yang bertujuan untuk mempertemukan para pelaku industri dengan para pembuat keputusan dari beragam tingkatan untuk mendiskusikan dan mencari solusi problematika perkembangan smart city di Indonesia.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) selaku Pendukung kegiatan Intertraffic Indonesia & Indonesia Infrastructure Week 2019 akan mengundang Kepala Dinas PU tingkat kotamadya seluruh Indonesia dalam kegiatan konferensi bertema **“Strategi Pembiayaan Infrastruktur di Daerah untuk Mendukung Pengembangan Smart City di Indonesia”**.

Rangkaian kegiatan **Intertraffic Indonesia 2019**:

- Intertraffic Award Southeast Asia
- “Smart Mobility” Pavilion
- “Security & Safety in Traffic” Pavilion

“ Intertraffic Indonesia merupakan kegiatan yang sangat strategis, baik bagi pemerintah kota dan swasta dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah.

Sri Indah Wibi Nastiti, Direktur Eksekutif, APEKSI

”

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

**Yuliani Astikasari** | **M** +62 8562018787 | **E** yastikasari@tarsus.co.id

6-8 NOVEMBER  
**2019**

JAKARTA INTERNATIONAL EXPO

**JAKARTA-ID**

Didukung oleh:



Diselenggarakan bersamaan dengan:



INDONESIA  
**INFRASTRUCTURE  
WEEK 2019**



Diorganisir oleh:



[www.intertraffic.com](http://www.intertraffic.com)

PROFIL 14



**Kota Probolinggo, Rumah Sakit Rujukan di Tapal Kuda**

Pengasuh Pondok Pesantren Riyadulus Sholihin, Ketapang, Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, terpilih menjadi Walikota Probolinggo.

JEJAK 12

**Sungai Penuh, Kota Wisata dan Peristirahatan**

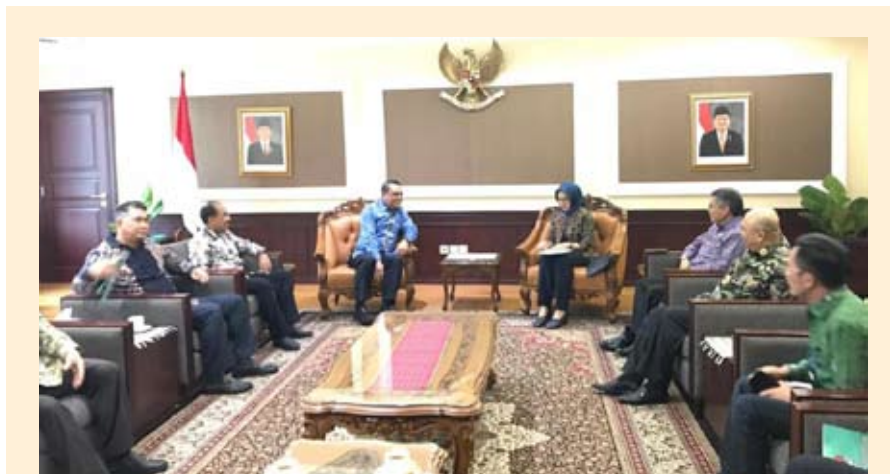
Sungai Penuh bukan sebuah kota yang dipenuhi sungai. Namun, kota yang berada di lembah, berada di ketinggian 700-1000 mpdl.

INFO APEKSI 24



**Kerjasama Luar Negeri, Hemat Anggaran Pembangunan**

Pemerintah kota belum banyak mengoptimalkan kerjasama luar negeri untuk menggenjot pembangunan.



**5 Mempermudah Seleksi P3K Bagi Tenaga Honorer**

Pemerintah terus meningkatkan kualitas penerimaan ASN yang menduduki posisi penting untuk mendukung birokrasi berbasis kinerja. Termasuk tenaga honorer dipermudah masuk ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perikatan Kerja (P3K).

LAPORAN KHUSUS

**16 Perbaiki Layanan Kesehatan Menuai Pro Kontra**

Permenkes 51 Tahun 2018 diarahkan untuk memperbaiki layanan kesehatan, mencegah terjadinya kecurangan. Namun, bisa memunculkan biaya ilegal yang tidak seharusnya.

- ♦ Mewadahi Profesional Masuk ASN 8
- ♦ Regulasi ASN Perjanjian Kerja 10
- ♦ Revisi Rujukan *Online* BPJS Kesehatan 19
- ♦ Terbukanya Peluang Kerjasama 21
- ♦ Membangun Pengelolaan Air Perkotaan Terintegrasi 26
- ♦ Melaksanakan Pemilu Damai 32
- ♦ Komwil V, Memperkuat Organisasi APEKSI 34
- ♦ Belajar Dari *Best Practice* Perkotaan 36

**KOTAKITA**  
Majalah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Diterbitkan oleh:  
**Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)**

**Alamat:**  
Rasuna Office Park III WO. 06-09,  
Komplek Rasuna Epicentrum  
Jl. Taman Rasuna Selatan, Kuningan,  
DKI Jakarta, 12960, Indonesia  
Telpon: +62-21 8370 4703  
Fax: +62-21 8370 4733  
<http://www.apeksi.or.id>

**Penanggung Jawab:** Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Airin Rachmi Diany  
**Pemimpin Redaksi:** Sri Indah Wibi Nastiti  
**Wakil Pemimpin Redaksi:** Imam Yulianto  
**Dewan Redaksi:** Dzulmi Eldin (Walikota Medan), Syarif Fasha (Walikota Jambi), Taufan Pawe (Walikota Parepare), Burhan Abdurahman (Walikota Ternate), Rizal Efendi (Walikota Balikpapan), Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor), Neni Moerniaeni (Walikota Bontang), M. Abdurahman, Tri Utari dan Sukarno, Suharto, Ahmad Adhito  
**Iklan:** Imam Yulianto  
**Administrasi & Distribusi:** Teguh Ardihiwiratno



# Terhambat Regulasi



Pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, Majalah *KotaKita* menurunkan laporan utama pengelolaan ASN di daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), di mana regulasi itu sejatinya mewadahi profesional dan diaspora masuk ASN. Namun, bagaimana nasib tenaga honorer yang sudah mengabdikan puluhan tahun.

Dewan Pengurus APEKSI pun melakukan audiensi dengan Menteri PAN-RB untuk klarifikasi P3K, termasuk regulasi lain yang menghambat di daerah. Regulasi itu untuk memperbaiki kualitas dan kompetensi ASN, agar percepatan pembangunan bisa segera diwujudkan. Masuknya profesional (semua profesi), termasuk diaspora bisa mengatasi keterlambatan pembangunan.

Sedangkan laporan khusus, mengulas implementasi Permenkes 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan. Meski peraturan ini diarahkan untuk memperbaiki layanan kesehatan, mencegah terjadinya kecurangan. Juga disinyalir bisa memunculkan biaya ilegal yang tidak seharusnya.

Termasuk pemberlakuan rujukan *online* yang dikeluarkan BPJS Kesehatan membuat layanan kesehatan di daerah semakin tidak menentu. Pasalnya sebaran dan kualitas rumah sakit belum merata. Ketersediaan kelas 3 rumah sakit kerap terpenuhi, akibatnya pasien harus naik kelas layanan.

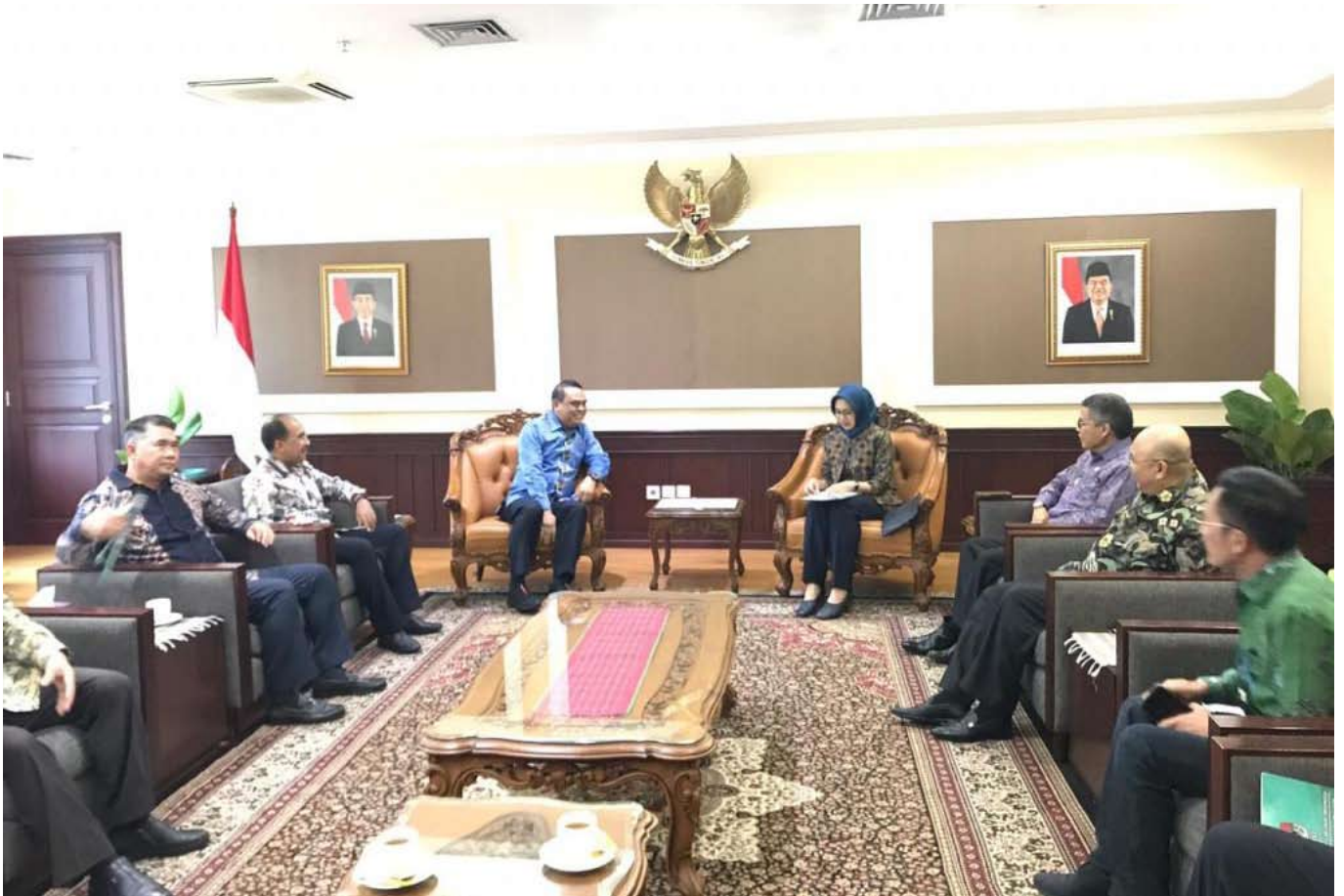
Sementara, tema lain banyak yang menarik di tahun 2019 ini antara lain kebutuhan air bersih di perkotaan menjadi tantangan serius. Pemerintah kota belum mengoptimalkan kerjasama luar negeri untuk menggenjot pembangunan. Membangun kota tangguh bencana, terbukanya kerjasama Negara Australia bagi pemerintah kota di Indonesia.

Rubrik daerah juga cukup menarik gelaran rapat kerja Komwil V, Komwil IV dan Komwil III, yang hasil rekomendasinya akan diusulkan ke Rakernas APEKSI di Semarang untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Rubrik lain Kota Sungai Penuh, bukan dipenuhi sungai tetapi kota yang sangat cocok untuk wisata dan peristirahatan.

Begitu pula dengan profil Walikota Probolinggo, akan menjadikan kotanya rujukan rumah sakit terlengkap di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Itulah sejumlah tema yang menemani pembaca di penghujung pada edisi kali ini.

Salam. **K**

# Mempermudah Seleksi P3K Bagi Tenaga Honorer



*Pemerintah terus meningkatkan kualitas penerimaan ASN yang menduduki posisi penting untuk mendukung birokrasi berbasis kinerja. Termasuk tenaga honorer dipermudah masuk ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perikatan Kerja (P3K).*



**D**ewan Pengurus (DP) APEKSI, pertengahan Januari 2019 lalu, melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Delegasi APEKSI dipimpin langsung oleh Ketua DP APEKSI, Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan), didampingi Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Dzulmi Eldin (Walikota Medan), Bidang Pembangunan Syarif Fasha (Walikota Jambi), Bidang Informasi Advokasi dan Hukum, Taufan Pawe (Walikota Parepare), Anggota Pengawas APEKSI, Jefirstson Riwu Kore (Walikota Kupang) serta pengurus APEKSI lainnya.

Delegasi APEKSI diterima Menteri PAN-RB, Safruddin di ruang rapat menteri. Mereka membahas berbagai isu penting terkait pengelolaan ASN yang berdampak pada pengelolaan ASN di pemerintah daerah. Salah satunya, keluarnya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Persoalan ASN, seperti dikeluhkan para walikota yang hadir sejatinya cukup banyak, mulai seleksi terbuka dengan menerapkan merit sistem. Banyaknya tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan yang tertunda diangkat menjadi ASN. Bila tidak segera diatasi bisa mengganggu layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.

Ketua DP APEKSI, Airin Rachmi Diany, saat membuka dialog dengan Menteri PAN-RB mengeluhkan status guru honorer. Di mana tenaga mereka dibutuhkan, namun statusnya masih belum jelas, termasuk tenaga kesehatan. Pendidikan dan kesehatan menjadi layanan penting di daerah. Airin meminta solusi atas status tenaga honorer (guru dan tenaga kesehatan), agar kinerjanya terjaga, terangnya.

Walikota Jambi, Syarif Fasha juga menyampaikan persoalan P3K di daerah. Selama ini tenaga honorer menjadi beban APBD. Bila seleksinya dibuka luas P3K bisa mengikuti. Sebab, tenaga honorer yang melalui jalur CPNS banyak yang tidak lolos seleksi. Untuk



Tagih janji diangkat PNS, guru honorer demo di depan Istana Negara.

di P3K syarat dan *passing grade* seleksi tenaga honorer bisa diturunkan. Pemda mohon diberikan kewenangan untuk memprioritaskan tenaga honorer yang sudah lama mengabdikan dan dibiayai APBD, terangnya.

Lebih lanjut, Syarif Fasha menyoroti masalah tenaga *inpassing* yang marak terjadi di daerah banyak dimanfaatkan untuk memperpanjang masa pensiun. Secara kualitas yang masuk *inpassing*, tidak begitu memuaskan untuk meningkatkan pengabdian. Seperti Eselon III usia 58 tahun diperbolehkan mengikuti tes *inpassing*. Jika lolos usia pensiun menjadi 60 tahun.

Atas kondisi seperti itu membuat daerah terbebani anggaran, apalagi tidak semua pejabat yang masuk *inpassing* memenuhi *qualified*. "Kami mengusulkan batas usia mengikuti *inpassing* 56 tahun dan daerah diberikan kewenangan terlibat menentukan usia," jelas Syarif Fasha.

Masalah lain disuarakan Walikota Parepare, Taufan Pawe. Di mana PP No. 49 Tahun 2018 pasal 2, menurutnya agak mengganggu. Di mana ASN bisa diisi P3K pejabat fungsional. Sedangkan tidak semua pejabat berasal dari fungsional. Di sinilah diperlukan evaluasi atau dibuat perangkat lainnya untuk pejabat pratama, harus menduduki jabatan dua tahun baru bisa dimutasi.

Selaku Pembina ASN, terang Taufan, kepala daerah merasa tersandera oleh kebijakan itu. Di mana setelah dilantik menjadi kepala daerah, walikota atau

bupati tidak bisa melakukan mutasi – meskipun dalam waktu satu tahun menduduki posisi itu bisa dilakukan evaluasi. Namun regulasi itu juga memberikan waktu enam bulan. "Kami tersandera waktu melakukan reformasi birokrasi di daerah," terang Taufan Pawe.

Adanya regulasi itu, kepala daerah tidak bisa leluasa melakukan reformasi birokrasi sesuai janji politik, yang dicanangkan saat maju Pilkada. Sementara, jabatan kepala daerah terbatas waktu (lima tahun), tersandera selama dua tahun yang membuat janji politik kepala daerah terlambat direalisasikan.

Walikota Parepare meminta kepada menteri untuk me-*review* regulasi atau mengganti aturan itu. Untuk kasus tertentu, kepala daerah sebagai pembina ASN di daerah diberikan kesempatan minta ijin ke Menpan agar pergeseran jabatan minus dua tahun dengan alasan yang jelas. "Saya harus melantik pejabat Parepare di Jakarta, hasil seleksi terbuka yang cukup panjang. Di mana batas usia 56 tahun persetujuan Mendagri baru keluar tadi malam dan saya lantik semalam di Jakarta, jika lewat bisa melanggar," terangnya.

Sementara Walikota Kupang, Jefirstson memberi penekanan pada diskresi khusus pada aturan. Kepala daerah diberikan kesempatan memilih orang khusus yang sudah berjuang untuk membantu pemerintah. Ternyata tidak bisa. Di mana kepala daerah tidak bisa bergerak leluasa atas aturan itu. Di mana kepala daerah



Syarif Fasha, Walikota Jambi.

sebelumnya sudah memasang orang-orangnya. Baru setelah dua tahun bisa diganti. "Ini sangat mengganggu kepala daerah yang terpilih. Akibatnya ganti semua setelah dua tahun, inilah yang terjadi di daerah. Kami beda pandangan dengan KASN," terangnya.

#### Jawaban Menteri

Selesai mendengarkan keluh kesah walikota yang hadir, Menteri PAN-RB, Syafruddin menguraikan terbitnya PP No. 49 Tahun 2018 tentang P3K, diakui judulnya kurang manis, namun isinya PP tersebut jika dipahami ada harapan besar. Syafruddin menceritakan yang pahit terlebih dahulu, ujungnya manis terkait PP tersebut. Di mana, untuk menyelesaikan PP itu, Kemenpan RB harus berjuang selama 1,5 tahun.

Begitu Syafruddin diberi kepercayaan menjadi Menteri PAN-RB, masalah yang berkembang tenaga honorer dan di lain sisi harus melakukan rekrutmen ASN. Tenaga honorer tersebar di daerah, yang tidak bisa diselesaikan dengan UU, maka dikejarlah P3K untuk mengatasi tenaga honorer. Meskipun tenaga honorer diberikan afirmasi yang memudahkan, mereka tetap saja sulit untuk lolos seleksi. Standar penerimaan diturunkan, jika digabung dengan baru lulus tenaga honorer kalah. "Lulusan SMA *fresh graduate* hasil seleksi cukup bagus diadu dengan honorer mereka tidak mampu. Makanya *passing grade* honorer diturunkan," terang Syafruddin.

Dia menegaskan P3K sejatinya bukan untuk tenaga honorer, dibuat untuk



Taufan Pawe, Walikota Parepare.

semua profesi termasuk diaspora bisa berkarir di ASN. Para profesional bisa mengabdikan kompetensinya untuk membangun bangsa. Meski demikian tidak meninggalkan tenaga honorer yang sudah berkeriat mengabdikan ke negara. Makanya di PP itu, diatur kemudian oleh peraturan menteri pasal 6 ketentuan dan persyaratan jabatan diatur kemudian.

Syafruddin menegaskan di P3K inilah ruang kepala daerah yang dikeluhkan bisa diatasi. Baik tenaga honorer guru, kesehatan dan lainnya. Sedangkan untuk tenaga administrasi dihentikan, sudah penuh. Sedangkan beban penda untuk membiayai tenaga honorer akan diakomodir, seperti tenaga honorer guru rata-rata usia 40-50 tahun akan ditampung melalui jalur P3K.

Untuk penerimaan tenaga honorer akan diberikan *passing grade* paling rendah agar semua bisa lolos seleksi, ditambah afirmasi. "Di situ ruang dan kesempatan tenaga honorer bisa diterima menjadi ASN. Kalau diadu dengan CPNS jelas kalah baik usia, persaingan yang ketat dan afirmasi tidak bebas," terang Syafruddin.

Meski demikian, dalam P3K disebutkan setiap tahun, ada satu pasal yang mensyaratkan dilakukan evaluasi. Untuk tenaga guru dan kesehatan bisa dibuat perjanjian 5 tahun dan bisa diperjanjikan dua kali. "Rata-rata guru honorer 5 tahun sudah 50 tahun ini harapannya ada di situ," jelasnya.

Terkait masa jabatan dua tahun baru bisa dimutasi untuk eselon II, Syafruddin menceritakan asal mula regulasi itu

bisa lolos. Ini tidak lain korban dari akses demokrasi. Dia menelusuri kenapa DPR terlalu emosional memasukkan pasal masa jabatan dua tahun baru bisa dimutasi. Begitu kepala daerah hasil Pilkada menyusun kabinet baru menghadapi kesulitan. Itu hasil masukan dari kepala daerah yang tahu akan kalah lalu kabinet sebelum keluar dirombak total dan sekarang menjadi kesulitan tersendiri.

Demokrasi, Syafruddin menjelaskan sejatinya begitu terpilih menjadi pemimpin akan membawa 70% kabinet baru dan itu wajar terjadi di mana saja. "Secara pribadi saya tidak setuju dengan cara mengunci kepala daerah tidak bisa melakukan reformasi birokrasi. Yang membuat birokrasi tidak jalan, tidak bagus dan tidak profesional. Itu barang masuk karena emosional," terangnya.

Dokter bisa menjadi kepala perhubungan, guru bisa menjadi camat, meskipun tidak semua. Secara tidak langsung saya sudah mendiskusikannya dengan kawan di DPR, sudah mewakili kepentingan kepala daerah. "Seandainya hal itu bisa dikelola di aturan lain sudah kita kunci. Namun karena tidak bisa, jalan satu-satunya digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan keputusan yang menggugurkan dari MK, kita bisa buat Perpres-nya," terangnya.

Secara pribadi, profesional, dan pemikiran rasional, Syafruddin tidak setuju sebagai prajurit yang mengabdikan kurang lebih 33 tahun, mendapati ada anak buahnya yang membuat kesalahan tidak bisa dicopot.

Untuk implementasi P3K, Kementerian PAN-RB mensosialisasikan penerimaan yang mengundang seluruh kepala daerah. Baik penerimaan P3K untuk tenaga profesional di bidang teknik sipil, arsitek, IT dan lainnya. Untuk P3K tenaga honorer guru memiliki sertifikasi dan masih aktif mengajar. Minimal pengabdian sudah mencapai 10 tahun.

Pertemuan walikota dengan Menteri PAN-RB, memberikan solusi atas kekhawatiran kepala daerah terhadap tenaga honorer, termasuk bagaimana melibatkan tenaga profesional mengisi jabatan penting di pemerintah daerah harus lolos seleksi P3K. **K**

# Mewadahi Profesional Masuk ASN



Syafruddin, Menteri PAN RB.

*Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018, diarahkan mengakomodasi semua profesi termasuk diaspora, masuk ASN menduduki jabatan penting. Bukan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS.*

**M**inimnya keahlian dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdampak tidak maksimalnya pengelolaan sumber daya menggenjot pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki pertambangan, salah satu contoh, minim dukungan ASN yang memahami bidang pertambangan. Bagaimana bisa mengatur pengelolaan pertambangan secara maksimal.

Di sejumlah daerah, contoh lain, yang giat membangun infrastruktur fisik penataan kota dan *smart city*, juga menghadapi masalah sama. Dukung ASN yang berlatar belakang keahlian bidang arsitek, sipil, dan teknologi informasi juga

minim. Pembangunan pun tidak optimal, mengandalkan tenaga ahli luar.

Bahkan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan di daerah, juga tidak maksimal. Apalagi laju jumlah ASN yang memasuki pensiun juga banyak. Daerah kekurangan ASN, dan memperbanyak tenaga honorer. Itulah potret ASN yang saat ini menjadi kendala pemerintah daerah menggenjot pembangunan. Lantaran keilmuan dan kualitas tidak sesuai bidang yang ditangani, hasil rekrutmen ASN masa lalu.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, bersungguh-sungguh membenahi dan meningkatkan kualitas ASN, baik melalui sistem rekrutmen dan peningkatan kompetensi ASN.

Peraturan Pemerintah (PP) No.

49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), disinyalir bisa mengurai benang kusut kualitas ASN. PP ini membuka peluang kalangan profesional masuk dalam struktur ASN. Terbitnya PP itu meski menuai pro dan kontra, karena mereka bisa mengisi jabatan fungsional maupun pimpinan tinggi, melalui jalur P3K. Jabatan tinggi dan fungsional tidak lagi menjadi monopoli ASN dari jalur PNS. ASN bisa diisi dari kalangan PNS dan P3K, namun P3K bukanlah PNS atau PNS bukan P3K. Ini terobosan pemerintah pusat, mengakomodasi profesional, termasuk diaspora menjadi ASN.

Menteri PAN RB, Syafruddin saat menerima pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), menjelaskan P3K sejatinya bukan untuk tenaga honorer, PP itu dibuat untuk semua profesi bisa masuk ke ASN, termasuk diaspora. Saat ini, setidaknya ada sekitar 3 juta orang Indonesia pintar yang tersebar di banyak negara. Potensi itu yang ditangkap pemerintah dan dilibatkan membangun bangsa, melalui karir di ASN.

Mereka bekerja di berbagai bidang, belajar dan berbisnis. Mereka juga terlibat di sejumlah profesi unggulan di negara maju, baik sebagai akademisi, peneliti, profesional dan dunia usaha. Berbagai bidang digeluti mulai energi, inovasi iptek, penataan kota layak huni, ekonomi hijau, kesehatan masyarakat, bisnis, investasi, kuliner, kedirgantaraan dan lainnya. Keterampilan, pengetahuan dan jaringan yang dimiliki menjadi potensi untuk bisa mendukung pembangunan di Indonesia.

Jika berpikir politik negara, Syafruddin menambahkan untuk membangun SDM, Indonesia sudah ketinggalan. Pembangunan SDM harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada, tanpa mengorbankan honorer yang sudah berkerenget, yang bekerja di fungsi pemerintahan. Diaspora pun menjadi aset bangsa yang potensial, yang terbiasa dengan persaingan ketat, bergelut di



berbagai bidang dan beragam profesi. "Itulah misi untuk melibatkan diaspora membangun bangsa," terang Syafruddin.

Makanya, jelas Syafruddin umur tidak dibatasi minimal 20 tahun hingga 1 tahun menjelang pensiun, sampai umur 57 tahun, kalangan profesional dan diaspora bisa masuk ASN. Untuk tenaga guru, misalnya batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia baik profesional, diaspora maupun honorer yang berusia 59 tahun. "Ini strategi menggaet diaspora, siapa tahu mereka memiliki keinginan mengabdikan pada negara," jelas Syafruddin.

Melalui kebijakan ini, Syafruddin berharap diaspora yang berada di luar negeri berkeinginan kembali ke Indonesia. Mereka diberikan kesempatan, membangun bangsa dengan ilmu dan pengetahuan yang telah dimiliki. Seperti peneliti, perekayasa, hingga dosen. "Seperti Dr. Archandra yang lain bisa kembali ke Indonesia. Kita tidak bisa menampilkan hal itu," tambahnya.

### Penerimaan P3K

Sejak menduduki posisi Menteri PAN-RB, Syafruddin disibukkan urusan tenaga honorer dan penerimaan CPNS. Di mana tenaga honorer yang mencapai 700 ribu lebih, yang tersebar di daerah. Awal PP No. 49 Tahun 2018 terbit banyak yang berharap tenaga honorer langsung diangkat menjadi PNS. Padahal PP itu mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, melalui mekanisme seleksi.

PP ini memberi ruang tenaga honorer yang telah mengabdikan kepada negara puluhan tahun, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. Tenaga honorer yang diprioritaskan di antaranya guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, dan tenaga khusus yang dibutuhkan pemerintah daerah.

Berdasarkan UU, tenaga honorer secara umur tidak memenuhi syarat, dilakukan tes kalah bersaing dengan lulusan baru, meskipun tenaga honorer diberikan afirmasi. Dipastikan kalah bersaing dengan lulusan baru, meski diberi standar paling rendah tetap kalah dengan *fresh graduate*.

Meski demikian, KemenPAN-RB, melalui



Saat ini, setidaknya ada sekitar 3 juta orang Indonesia pintar yang tersebar di banyak negara.

P3K ini tetap mengakomodasi tenaga honorer untuk diterima sebagai ASN dengan *passing grade* paling rendah agar lolos, ditambah afirmasi. "Di situ ruang memberikan kesempatan tenaga honorer menjadi ASN. Jika diadu dengan CPNS kalah, baik dari sisi umur, kualitas dan persaingan tes yang ketat. Apalagi afirmasi tidak bebas dilakukan," terang Syafruddin.


Tahun ini, Syafruddin menegaskan sesuai anggaran dan kemampuan daerah, akan direkrut 250 ribu ASN. Hasil rekrutmen ini untuk mengganti ASN yang memasuki masa pensiun. Penerimaan rekrutmen baru mengacu pada PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 49 Tahun 2018. Untuk CPNS formasinya 40% atau 100 ribu, sedangkan jalur P3K formasinya 60% atau 150 ribu.

Setidaknya jalur P3K sebanyak 150 ribu diambil dari tenaga honorer tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh pertanian. Penerimaan dilakukan 75 ribu sebelum pemilu dan 75 ribu lagi setelah pemilu. Sedangkan CPNS tahun ini diatur kemudian. Sedangkan tenaga administrasi dihentikan. Sedangkan beban pemda terkait honor akan diakomodir, guru honorer yang tidak tertampung karena lewat usia, melalui jalur P3K ini bisa masuk menjadi ASN. Rata-rata usia guru honorer paling rendah 40 tahun. "P3K ini ruang pemerintah daerah mengakomodasi tenaga honorer yang sudah berkeringat

masuk ASN," tambahnya.

Untuk memasuki ASN melalui jalur P3K ada tahapan seleksi administrasi dan kompetensi. Jika lolos seleksi ini dilanjutkan dengan wawancara untuk menilai integritas, untuk melengkapi hasil seleksi. ASN berstatus P3K mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. Hak dan kewajiban sama dengan ASN yang berstatus PNS. Kecuali jaminan pensiun, P3K mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

P3K ini, setiap tahun dilakukan evaluasi, untuk memperpanjang kontrak. Kontrak untuk tenaga guru dan kesehatan bisa dilakukan setiap lima tahun sekali. "Bisa diperjanjikan dua kali. Rata-rata guru honorer 5 tahun sudah 50 tahun ini harapannya ada di situ" terangnya.

Data dan jumlah tenaga honorer guru yang sudah terverifikasi DPR RI mencapai 71 ribu. Perekrutan P3K dari tenaga honorer, syarat minimal untuk tenaga guru adalah S1. Jika tidak memenuhi syarat, tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Manakala bila belum tertampung dalam P3K, tenaga honorer itu akan diatur menjadi pegawai pemerintah yang ditempatkan di daerah. Dengan kompensasi di atas UMR regional, yang dibiayai dari DAU, yang saat ini masih proses. "Sebab, tenaga honorer sudah tidak boleh lagi," jelas Syafruddin. 



Ujian seleksi calon pegawai negeri sipil.

# Regulasi ASN Perjanjian Kerja

*Inilah regulasi yang mengatur ASN yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selain gaji dan tunjangan, pegawai P3K mendapat peningkatan kompetensi untuk yang berprestasi.*

**S**ejak diterbitkan, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), telah dilengkapi sedikitnya empat PP peraturan pelaksana. Di antaranya PP No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional; PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). PP No. 49 Tahun 2018 ini mencatol di pasal 107 UU ASN.

Lalu apa saja yang diatur PP No. 49 Tahun 2018? Sedikitnya ada 13 bab penting yang diatur, mulai dari penetapan kebutuhan P3K, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian

penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan, cuti, pengawasan dan evaluasi, larangan hingga ketentuan peralihan.

PP No. 49 Tahun 2018 mengatur penetapan kebutuhan P3K, dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. Mereka diwajibkan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah P3K dilakukan untuk jangka waktu lima tahun yang diperinci per satu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan jumlah P3K menjadi satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Kebutuhan P3K secara nasional ditetapkan menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri keuangan dan pertimbangan teknis kepala BKN. Pejabat Pembina Kepegawai (PPK) dapat mengusulkan kepada

presiden melalui menteri kebutuhan JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu yang dapat diisi P3K setelah ditetapkan nomenklatur jabatan dan pangkatnya oleh presiden. Usulan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Lalu tahapan pengadaan dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil hingga pengangkatan menjadi P3K. Sedangkan persyaratan melamar P3K antara lain setiap warga negara, minimal umur 20 tahun atau kurang satu tahun batas pensiun, bebas terpidana dan penjara, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak menjadi anggota dan pengurus parpol, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan yang diisi, memiliki kompetensi yang disertai sertifikasi, sehat jasmani dan rohani, serta syarat lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan PPK.

Pengadaan calon P3K dilakukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan P3K, panitia seleksi instansi pengadaan P3K, dan instansi Pembina Jabatan Fungsional (JF). Untuk pengadaan nasional sesuai dengan rencana kebutuhan jumlah P3K. Proses pengadaan yang objektif,



dengan membentuk panitia seleksi nasional pengadaan P3K. Panitia seleksi nasional bertugas mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan pengadaan P3K yang dilakukan pembina JF dan panitia seleksi instansi pengadaan P3K. Khusus untuk pengadaan P3K pengisian JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang lowongannya dilakukan setelah memenuhi ketentuan. Pengisian JPT ini dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan KASN.

Setelah diterima menjadi pegawai P3K, seseorang berhak mendapat gaji dan tunjangan. Jika gaji dan tunjangan belum ditetapkan, maka gaji dan tunjangan mengacu pada ketentuan gaji dan tunjangan PNS yang besarnya diatur dengan peraturan presiden. Selain gaji, pegawai P3K juga mendapat perlindungan jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian dan bantuan hukum. Pegawai P3K juga mendapat hak untuk cuti tahunan, sakit, melahirkan bersama.

Pegawai P3K, prestasi kinerjanya, dilakukan penilaian oleh tim panitia penilai P3K. Penilaian yang dilakukan secara objektif atas prestasi kinerja, mengacu pada perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai P3K. Penilaian ini dilakukan mencakup penilaian individu, unit organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai P3K. Penilaian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja ini dilakukan berjenjang yang dilakukan oleh atasannya langsung. Teknik penilai memperhatikan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan. Hasil penilaian ini disampaikan ke tim penilaian kinerja P3K, yang dioptimalkan untuk memperpanjang kontrak berikutnya, pemberian tunjangan, hingga dasar pengembangan kompetensi.

Bila penilaian kinerja tidak mencapai kinerja sesuai kontrak, pegawai P3K bisa diberhentikan. Kontrak P3K paling sedikit satu tahun, yang bisa diperpanjang sesuai kebutuhan sesuai dengan penilaian kinerja. Dan untuk P3K yang menduduki JPT Utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 tahun.

### **Peningkatan Kompetensi**

Bukan hanya gaji dan tunjangan, pegawai P3K juga diberikan peningkatan kompetensi untuk mendukung tugas dan perannya. Peningkatan kompetensi ini mengacu pada hasil penilaian kinerja, di mana pegawai P3K yang terpilih akan mendapatkan 24 jam pelajaran dalam waktu satu tahun. Peningkatan kompetensi ini juga dicatat dan terintegrasi dengan sistem pelatihan ASN.

Pejabat yang bersangkutan berhak menentukan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi. Juknis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi P3K diatur oleh peraturan Kepala LAN.

Selain pengembangan kompetensi, pegawai P3K juga diberikan penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya. Penghargaan yang diberikan bisa berupa tanda kehormatan, kesempatan prioritas pengembangan kompetensi atau kesempatan menghadiri acara resmi kenegaraan. Penghargaan ini diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk penghargaan pengembangan kompetensi diberikan pada pegawai P3K dengan penilaian kinerja sangat baik. Penghargaan ini diberikan pejabat yang bersangkutan yang disetujui tim penilaian kinerja P3K.

Pegawai P3K juga kena aturan kedisiplinan, bila pegawai itu melanggar ada sanksinya. Lebih lanjut, pegawai P3K bisa berakhir masa kontraknya karena waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia, tewas dan hilang, atas permintaan sendiri, PHK, tidak cakap jasmani dan rohani yang berpengaruh terhadap tugas dan kewajiban tidak sesuai dengan perjanjian kerja.


Pemutusan kontrak bisa dilakukan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri. Seperti yang bersangkutan tersangkut pidana penjara paling singkat 2 tahun yang memiliki kekuatan hukum tetap. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Atau pemutusan kontrak dengan tidak hormat, karena yang bersangkutan melakukan penyelewengan terhadap UU Dasar 1945,

yang bersangkutan dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, menjadi anggota atau pengurus parpol, atau karena mendapat hukuman 2 tahun dengan kekuatan hukum tetap.

Sebagai profesi, ASN memiliki norma dasar, kode etik dan perilaku, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN yang dilaksanakan instansi pemerintah mendapat pengawasan dan evaluasi dari KASN. Menteri melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen P3K dan hasil evaluasi sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan P3K.

PP No. 49 Tahun 2018 memberikan pelarangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengangkat pegawai non PNS atau non P3K mengisi jabatan ASN. Larangan ini berlaku di seluruh instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non PNS atau non P3K. Jika dilarang PPK dan pejabat lain bakal kena sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Meski PP No. 49 Tahun 2018 telah mengatur manajemen P3K, namun peraturan presiden tentang jenis jabatan ASN yang bisa diisi P3K belum ditetapkan. Di mana implementasi P3K yang bisa mengisi pimpinan tinggi di instansi pemerintah keberadaannya diatur keputusan presiden. Di sisi lain ada pula pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) dan pegawai kontrak lain. Sedangkan penilaian kinerja P3K mendorong Kementerian PAN-RB untuk mengeluarkan regulasi. Dan PP No. 49 Tahun 2018 ini perlu pula dilengkapi dengan regulasi dari Kementerian PAN-RB untuk mengatur jabatan lain yang dapat diisi P3K.

Implementasi PP No. 49 Tahun 2018 mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan jabatan yang ada, yang dapat diisi pegawai P3K. Pemerintah daerah perlu pula melakukan identifikasi dan inventarisasi jabatan tenaga non PNS, menyusun strategi pengisian peta jabatan dengan data tenaga non PNS. Baru melakukan pengisian jabatan oleh P3K sesuai mekanisme yang berlaku. Serta melakukan evaluasi terhadap pengisian jabatan dan penetapan jabatan ASN yang diisi dari P3K. 

# Sungai Penuh, Kota Wisata dan Peristirahatan



Tugu Adipura, salah satu ikon Kota Sungai Penuh.

*Sungai Penuh bukan sebuah kota yang dipenuhi sungai. Namun, kota yang berada di lembah, berada di ketinggian 700-1000 mpdl. Udaranya sejuk, cocok sebagai kota wisata dan peristirahatan. Kota ini pun terus berbenah diri.*

**S**ejarah Sungai Penuh tak lepas dari induknya, Kabupaten Kerinci. Zaman dulu, Danau Kerinci yang luas, menjadi muara dari banyak sungai. Di sepanjang aliran sungai, airnya kerap meluap, penuh, luber menyebabkan sebagian wilayah Kerinci dilanda banjir.

Salah satu sumber mata air yang mengalir ke sungai, yang bermuara ke danau berasal dari Sumur Pulai. Konon, mata air sumur itu tidak pernah kering, meski musim kemarau berkepanjangan. Airnya melimpah, sungai yang dialiri pun selalu penuh. Masyarakat pun memanfaatkan air Sumur Pulai untuk memenuhi kebutuhan air setiap hari.

Sungai yang selalu penuh, yang bermata air dari Sumur Pulai, membuat

masyarakat menyebut daerah itu dengan sebutan Sungai Penuh. Lama kelamaan menjadi nama daerah itu dengan sebutan "Sungai Penuh". Sumur Pulai saat ini posisinya berada di Jalan Yos Sudarso, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh.

Jaman Kolonial Belanda, tahun 1909, Sungai Penuh pernah dijadikan pusat pemerintahan, *Onderafdeeling* Kerinci. Di mana Kerinci menjadi Karesidenan dari Jambi. Tidak berlangsung lama Belanda mengalihkan Sungai Penuh menjadi Karesidenan dari Sumatera Barat. Setelah merdeka, tahun 1957, Kerinci ditetapkan sebagai kabupaten, Sungai Penuh menjadi pusat kabupaten dan masuk Provinsi Jambi. Secara geografis, memang Sungai Penuh, berada di wilayah paling barat Provinsi Jambi dan menjadi pertemuan tiga provinsi di Sumatera yaitu

Jambi, Sumatera Barat dan Bengkulu.

Perkembangan Sungai Penuh sangat pesat, bahkan melebihi kemampuan daya dukung Kerinci. Pada tahun 1970, masyarakat mendorong Sungai Penuh menjadi daerah otonom lepas dari Kerinci. Namun, baru 38 tahun kemudian, Sungai Penuh ditetapkan sebagai daerah otonom. Tepatnya tahun 2008, Sungai Penuh lepas dari induknya Kabupaten Kerinci, dan menjadi daerah otonom.

Sebagai daerah otonom, Sungai Penuh memiliki lima kecamatan yaitu Sungai Penuh, Kumun, Debai, Hampan Rawang, Pesisir Bukit dan Tanah Kampung. Lima tahun kemudian, kecamatan di Kota Sungai Penuh dimekarkan menjadi delapan, dengan menambah tiga kecamatan yaitu Pondok Tinggi, Sungai Bungkal, dan Koto Baru.

Adalah Hasril Muhammad, pejabat sementara yang ditunjuk sebagai Walikota Sungai Penuh periode 2008-2009, dilanjutkan Hasvia Hasyimi, juga pejabat sementara, menjadi walikota periode 2009-2011, dan Akmal Thaib, pejabat sementara, memimpin pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, 2011, dilakukan pemilihan langsung walikota dan wakil walikota terpilih adalah pasangan Asafri Jaya Bakri dengan Ardinal Salim. Pasangan itu dipercaya memimpin Kota Sungai Penuh periode 2011-2016. Periode kepemimpinan berikutnya, melalui Pilkada langsung, Asafri Jaya Bakri masih dipercaya melanjutkan kepemimpinan di Sungai Penuh, yang berpasangan dengan Zulhelmi. Mereka, dipercaya memimpin Sungai Penuh 2016-2021.

## Sungai Penuh Menggeliat

Kota Sungai Penuh, berada di dataran tinggi berbukit, dikelilingi Bukit Barisan dan hutan tropis. Itu membuat Sungai Penuh beriklim sejuk dan nyaman. Kota ini dikenal sebagai pusat pengumpul distribusi hasil pertanian, pusat



pemerintahan, juga pusat perdagangan dan jasa. Mata pencaharian masyarakat banyak di sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, dan lainnya.

Di bawah kepemimpinan Walikota Asafri Jaya Bakri kota ini banyak kemajuan membenahi diri. Pembangunan menunjukkan peningkatan, seperti jalan, perairan, jembatan layang kerinduan, dan fasilitas lainnya. Daerah Aliran Sungai (DAS) ditata, diturap, jaringan irigasi direhabilitasi, dilakukan normalisasi. Sedikitnya mencapai 31,68 km aliran sungai dinormalisasi.

Infrastruktur itu untuk mendukung Sungai Penuh Cerdas, visi yang dicanangkan Asafri Jaya Bakri pada periode kepemimpinannya. Sungai Penuh mampu mengkoneksitaskan infrastruktur di daerahnya, guna mendukung daya saing kota. Pemerintah kota terus menggenjot pembangunan jalan, baik kuantitas dan kualitas. Di tahun 2010 sepanjang 168,456 km menjadi 192,74 km di tahun 2018.

Asafri Jaya Bakri (AJB) dinilai mampu meletakkan pondasi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil pembangunan bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan dilakukan secara merata. Angka kemiskinan pun turun drastis menjadi 2,78%.

Untuk mendukung daya saing kota, AJB menerangkan ekonomi masyarakat desa ditumbuhkan, dengan menggenjot munculnya wirausaha baru. Hasilnya Indeks Desa Membangun (IDM) masuk 10 besar nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sungai Penuh tampil yang tertinggi di Provinsi Jambi. Seperti IPM 2011-2015 rata-rata di atas provinsi dan nasional yaitu 72,48%, tahun 2016 mencapai 73,75%, dan tahun 2017 mencapai 73,78%. Angka harapan hidup semakin meningkat seperti di tahun 2015 mencapai 72,9%.

AJB terus memotivasi jajaran pemerintah kota agar kemajuan pembangunan tepat sasaran, tertib aturan dan administrasi. Sebab, itu berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Sungai Penuh. Seperti di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,24%, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku juga mengalami



Asafri Jaya Bakri, Walikota Sungai Penuh.

peningkatan. Di tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 5,73 triliun, menjadi Rp 6,38 triliun pada tahun 2017. "Ini merupakan indikasi tumbuhnya kelas menengah di Kota Sungai Penuh," jelas Asafri.

Kota Sungai Penuh terus meningkatkan pertumbuhan, pemerataan yang berkelanjutan. Baik sebagai pusat perdagangan dan jasa, tanpa mengabaikan sektor lain. Program pembangunan pasar di tingkat kecamatan mulai digarap. Pusat pertumbuhan yang berada di pusat kota digeser ke tingkat kecamatan seperti Pasar Pesisir Bukit, Tanah Kampung, dan Kumun Debai untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan. Sedangkan Pasar Tanjung Baure yang berdekatan dengan terminal, dicanangkan menjadi pasar tradisional modern.

Sebagai kota wisata dan peristirahatan, Sungai Penuh didukung dengan banyak objek wisata alam. Seperti Bukit Khayangan dan Bukit Semancik. Di bukit ini panorama alam Kota Sungai Penuh terlihat jelas. Danau Kerinci, Gunung Kerinci, hamparan sawah membentang, serta desa yang tertata di pinggiran bukit hijau terlihat jelas. Di Bukit Sentiong, pemandangan Kota Sungai Penuh dapat dinikmati dari ketinggian ini baik menjelang sore dan malam hari.

Objek wisata alam yang berjejer dan menarik lainnya Bukit Tapan, Taman Bunga Puti Senang, Air Terjun Telun Berasap, Perkebunan Teh Kayu Aro, Danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh, sumber air panas Semurup, dan lainnya.

Bisa dikatakan obyek wisata alam di Jambi, adanya di sekitar Kota Sungai Penuh. Apalagi kota ini dekat *basecamp* pendakian Gunung Kerinci. Dan tak heran Sungai Penuh menjadi kota wisata dan kota peristirahatan. Berbagai penginapan mulai dari yang murah, sederhana hingga bagus pun tersedia.

Potensi wisata dan pengembangannya mendorong pemerintah kota terus membenahi dan mengembangkan usaha mikro dan menengah. Pemkot berkolaborasi dengan tim penggerak PKK, untuk meningkatkan berbagai kompetensi SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif. Terutama di bidang kuliner, untuk menyongsong pengembangan pariwisata dan agrobisnis di Sungai Penuh sebagai sektor andalan.

Prestasi Pemerintah Kota Sungai Penuh, antara lain pengelolaan keuangan dalam empat tahun terakhir mendapat opini WTP dari BPK RI; Penghargaan Sertifikat SIDA 2018 dari Kemenristekdikti; Penghargaan kota peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI; Penghargaan IKCI 2018, kategori kota kecil; penghargaan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, atas keberhasilan pembangunan pedesaan.

Pencapaian itu sangat menggembirakan. Kota Sungai Penuh tidak memiliki kekayaan alam, hanya mengandalkan kerja keras dan dedikasi, baik jajaran pemkot, masyarakat dalam membangun Kota Sungai Penuh lebih maju. **K**

# Kota Probolinggo, Rumah Sakit Rujukan di Tapal Kuda



Hadi Zainal Abidin bersama M Soufis Subri, Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo.

*Pengasuh Pondok Pesantren Riyaldus Sholihin, Ketapang, Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, terpilih menjadi Walikota Probolinggo pada Pilkada Serentak 2018 lalu. Sosoknya sederhana, dekat dengan santri, suka memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.*

**P**ria kelahiran Probolinggo 1979 silam itu, dibesarkan di lingkungan pesantren. Hadi Zainal Abidin adalah putra pendiri pondok pesantren Riyaldus Sholihin, Ketapang, Probolinggo, Habib Muhammad Bin Ali Al-Habsyi. Masa sekolah dihabiskan di kota kelahirannya. Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Riyaldus Sholihin (2005). Setelah lulus MA, Hadi melanjutkan studi ilmu Pendidikan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo di Kota Malang (2010).

Penghobi olah raga sepak bola ini, aktivitas keseharian setelah menamatkan sarjananya, lebih banyak membantu membesarkan pondok pesantren. Di pondok ini dia didapuk sebagai pengasuh pondok pesantren. Di hadapan santri, Habib Hadi Zainal Abidin dikenal bijaksana, selalu “*nguwong ne*”, mengorbankan semua, termasuk santri, fakir miskin dan lainnya. Jiwa sosialnya tinggi, selalu mengajarkan sikap sopan santun dan tata krama, di mana pun santri berada.

Habib Hadi Zainal Abidin, termasuk pihak yang paling khawatir terhadap perkembangan *gadget*, berpengaruh

negatif terhadap pola pikir dan aktivitas santri. Pengaruh negatif harus dieliminir agar tidak berpengaruh terhadap masa depan santri. Di waktu luang, Habib pun kerap meluangkan waktu bersama keluarga, meski hanya sekadar keliling Kota Probolinggo.

Tahun 2011, Habib Hadi Zainal Abidin menyelesaikan Pendidikan Magister Manajemen, Universitas Panca Marga, Probolinggo. Habib tergolong hobi berorganisasi, di luar pesantren, bergabung di organisasi sayap Partai Golkar-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Habib juga dipercaya menjadi penasehat forum komunikasi kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM).

Tahun 2004, Habib bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) besutan Gus Dur. Dia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Probolinggo (2005-2007). Tahun 2008, Habib diangkat menjadi anggota Dewan Syuro PKB Jawa Timur (2008-2009). Habib pun terjun ke dunia politik praktis dan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (2009-2014), membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup.

Di tahun 2011, Habib Hadi juga merangkap sebagai Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur (2011-2016). Pesta demokrasi tahun 2014, Habib Hadi mencalonkan diri menjadi Caleg DPR RI. Hasilnya masyarakat Dapil Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) mempercayai Habib Hadi menjadi anggota DPR RI 2014-2019.

Di DPR RI, Habib Hadi Zainal Abidin membidangi Komisi XI, yaitu keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. Tahun 2016, Habib mutasi peran ke Komisi VII, yang membidangi energi, sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Kota Probolinggo letaknya strategis,



di lintasan tengah dan timur di Provinsi Jawa Timur. Meski tergolong kota kecil, Probolinggo menyimpan potensi luar biasa yang dikembangkan. Itu membuat Habib Hadi Zainal Abidin, 20 Februari 2018 mengundurkan diri dari keanggotaan DPR RI, mengikuti Pilkada Kota Probolinggo. Pasangan Hadi Zainal Abidin-M Soufis Subri, bersaing dengan empat pasangan calon lainnya. Hasilnya pasangan ini memperoleh dukungan suara terbanyak 60.354, mengalahkan pasangan lain dan ditetapkan sebagai calon terpilih.

### Membangun Daerah Tapal Kuda

Habib Hadi Zainal Abidin, yang kerap memakai kain sarung dan berkopiah putih, hari pertama berkantor di Balai Kota telah merubah kebiasaan berpakaian. Mengenakan kemeja batik khas Probolinggo, dipadu dengan celana hitam. Hadi Zainal Abidin pun mulai menyapa PNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Probolinggo, terang Hadi Zainal Abidin, adalah kota kecil, namun memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan. Kekuatan anggaran yang ada, akan dioptimalkan untuk merealisasi program yang menyentuh masyarakat. "Potensi itu ada dan sangat banyak yang bisa dikembangkan," terangnya.

Habib Hadi, sapaan akrab Hadi Zainal Abidin akan fokus pada program pendidikan dan kesehatan akan terus ditata dan dibenahi untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Untuk meningkatkan layanan publik, Pemkot Probolinggo di bawah kepemimpinan Hadi Zainal Abidin berencana mengambil alih pengelolaan Probolinggo Plaza, yang strategis dioptimalkan sebagai tempat layanan publik yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Saat ini terus dilakukan negosiasi dengan pengelola yaitu PT Avila Prima Intra Makmur.

Visinya membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman dan berkelanjutan. Program unggulan seperti di bidang pemerintah menuntaskan kesejahteraan pegawai atas kontrak. Di bidang pendidikan merealisasi pendidikan gratis yang menjadi kewenangan



Hadi Zainal Abidin menjenguk pasien di RSUD dr. Mohammad Saleh.

pemerintah kota. Sedangkan bidang kesehatan merencanakan pengadaan ambulans di setiap kelurahan. Ini untuk mempercepat layanan kesehatan di tengah masyarakat. Juga meningkatkan kesejahteraan penggiat posyandu.

Kepemimpinan Hadi Zainal Abidin, juga merencanakan membangun rumah sakit bertaraf nasional. Rumah sakit ini diharapkan menjadi rumah sakit rujukan di wilayah tapal kuda Jawa Timur, mencakup Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Jember dan Banyuwangi. Rencana rumah sakit itu dibangun di atas lahan 4 ha. Diharapkan keberadaan rumah sakit baru ini mampu mendorong ekonomi masyarakat dan perbaikan kesehatan masyarakat perkotaan.

Wacana pembangunan rumah sakit itu, sejatinya pernah digulirkan pemerintahan sebelumnya, namun belum terlaksana. Hadi Zainal Abidin bertekad mewujudkan dan RSUD Dr. M Saleh akan dialihfungsikan menjadi rumah sakit spesialis penyakit tertentu.

Pembenahan pendidikan dan kesehatan menjadi konsen masa kepemimpinan Hadi Zainal Abidin, sebab dua bidang itu sebagai dasar menuju masyarakat Probolinggo maju dan makmur.

Di sektor lain, Hadi Zainal juga berencana melakukan optimalisasi wilayah pesisir Pantai Mayangan menjadi

kawasan wisata baru, yang diharapkan mampu menjadi magnet untuk menarik wisatawan datang. Sebab setelah ada jalan tol, omset pengusaha berkurang hingga 40 %. Dengan dibukanya destinasi wisata baru, semakin menambah minat masyarakat luar singgah ke Probolinggo. Wisata baru itu diharapkan bisa menyedot pengunjung hadir. "Melihat jangka panjangnya harus ada inovasi agar masyarakat luar mau berkunjung ke Probolinggo," terangnya.

Kawasan kumuh ditata agar menarik wisatawan datang, proses perijinan dipermudah untuk memudahkan investasi masuk dan menyerap tenaga kerja. Ekonomi kerakyatan dikembangkan, industri dan perdagangan, pemberdayaan UMKM, lingkungan dan kesenian. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan kerjasama yang harmonis di antara pemerintah kota, pemangku kepentingan dan masyarakat Probolinggo.

Blusukan di daerah pingiran untuk melihat, mendengar, keluhan masyarakat, untuk membuat program pemerataan pembangunan agar masyarakat Probolinggo makmur secara menyeluruh. Sejak serah terima jabatan, Hadi Zainal Abidin langsung kerja untuk masyarakat. Dia terus blusukan di daerah pingiran untuk melihat, mendengar, keluhan masyarakat, dan pemeratakan pembangunan. **K**



Presiden Jokowi membuka Kongres XIV PERSI, di JCC, Jakarta.

# Perbaiki Layanan Kesehatan Menuai Pro Kontra

*Permenkes 51 Tahun 2018 diarahkan untuk memperbaiki layanan kesehatan, mencegah terjadinya kecurangan. Namun, bisa memunculkan biaya illegal yang tidak seharusnya.*

**P**engelolaan dana kesehatan masyarakat, yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit pembiayaan. Iuran yang diangsur masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah, yang dikelola BPJS Kesehatan tidak mampu mencukupi

membayai rawat jalan dan inap pasien. Itu membuat pemerintah kedodoran menggelontorkan dana talangan menutup defisit. Namun, dana yang dikucurkan juga belum mampu menutup defisit.

Bahkan tingginya belanja BPJS Kesehatan itu mendapat kritikan Presiden Joko Widodo. Pada Kongres Perhimpunan

Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Oktober 2018 lalu, Joko Widodo sempat mengkritik pengelolaan BPJS yang tidak optimal. Tahun 2017 terdapat klaim penyakit jantung mencapai Rp 9,25 triliun, yang dianggap terlalu besar. Sedangkan penyakit kanker mencapai Rp 3 triliun, gagal ginjal sebesar Rp 2,25 triliun. Sedangkan penyakit lain seperti katarak Rp 2,25 triliun, dan fisioterapi Rp 965 miliar.

Jokowi juga menegur Direktur Utama BPJS dan Menteri Kesehatan untuk segera menyelesaikan defisit yang melanda, agar layanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Masalah defisit harus



bisa diselesaikan di tingkat menteri dan manajemen BPJS. Presiden meminta BPJS membangun sistem manajemen pengelolaan yang kuat, agar bisa terhindar dari defisit di kemudian hari.

Buntut defisit anggaran membuat Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan guna mencegah kecurangan. Desember 2018 lalu mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018, tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan. Peraturan untuk mengendalikan mutu dan biaya serta pencegahan penyalahgunaan layanan di fasilitas kesehatan program jaminan kesehatan. Peraturan itu mengatur urun biaya dan selisih bayar yang harus ditanggung pasien, di luar iuran bulanan.

Untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan rumah sakit tipe A kelas B, pasien dikenakan biaya sebesar Rp 20 ribu. Lalu kunjungan rawat jalan rumah sakit tipe C kelas D dan klinik utama dikenakan biaya Rp 10 ribu. Paling tinggi sebesar Rp 350 ribu untuk kunjungan maksimal 20 kali dalam waktu tiga bulan.

Sedangkan rawat inap, nilai nominal maksimal atas biaya pelayanan kesehatan, minimal 10% dan paling tinggi dengan nominal tertentu dari biaya pelayanan. Dengan ketentuan sebesar 10% dari biaya pelayanan dihitung dari tarif INA-CBG setiap kali melakukan rawat inap. Atau paling tinggi sebesar Rp 30 juta.

Untuk rawat inap kelas satu, urun biaya yang ditetapkan Permenkes No. 51 sebesar 10% yang dihitung dari total tarif INA-CBG. Di mana BPJS Kesehatan membayar klaim pelayanan ke rumah sakit hanya sebesar biaya pelayanan yang diberikan rumah sakit dikurangi besaran urun biaya. Dengan begitu peserta BPJS Kesehatan bisa meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya termasuk rawat jalan eksekutif. Peningkatan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya dilakukan di rumah sakit.

Peserta yang ingin meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya dikenakan selisih biaya antara biaya yang dijamin BPJS Kesehatan dengan biaya



Peserta BPJS Kesehatan.

yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan. Pembayaran selisih biaya dapat dilakukan secara mandiri peserta, pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan.

Peningkatan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak peserta. Pelayanan rawat jalan eksekutif merupakan pelayanan kesehatan rawat jalan nonreguler di rumah sakit melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di rumah sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar. Urun biaya dan selisih biaya tidak berlaku bagi Peserta Bantuan Iuran (PBI), peserta yang didaftarkan pemerintah daerah, dan pekerja penerima upah yang terkena PHK dan keluarganya.

#### Pro kontra

Keluarnya Permenkes 51 Tahun 2018 menuai pro kontra. Banyak pihak menilai peraturan itu bisa menimbulkan kerugian pasien peserta BPJS Kesehatan, pasien rawat inap yang melakukan peningkatan kelas perawatan lebih tinggi. Peserta tidak gratis lagi menikmati layanan, padahal setiap bulannya mengangsur sejumlah iuran.

Urun biaya, dianggap sebagai celah yang bisa menimbulkan kerugian.

Peningkatan kelas kamar rumah sakit, contohnya, tidak sesuai haknya, tidak tersedia atau penuh, bisa berpotensi menambah beban peserta. Meski peningkatan rawat dibatasi satu tingkat kelas di atasnya yang menjadi hak peserta.

Ini disinyalir, rumah sakit belum mampu menyediakan ketersediaan kamar rawat inap sesuai Permenkes 56 Tahun 2014. Ketersediaan kamar inap rumah sakit, seharusnya ketersediaannya sesuai aturan agar peserta BPJS Kesehatan tidak naik kelas perawatan. Padahal aturan mewajibkan di semua rumah sakit minimal 20% jumlah total tempat rawat inap. Justru, banyak rumah sakit membangun kelas VIP daripada kamar kelas 3 dan 2.

Direktur Advokasi Jamkeswatch, Daryus, menguraikan peningkatan kelas perawatan dan urun biaya, dengan mengecualikan peserta PBI. Kenyataannya banyak peserta PBI dan peserta BPJS Kesehatan kelas 3, yang tidak ditunjang ketersediaan kamar kelas 3 di rumah sakit.

Terkait kewajiban faskes menginformasikan jenis pelayanan yang dikenakan urun biaya dan estimasi biaya kepada peserta serta meminta persetujuan ketersediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan. Kenyataannya begitu kamar hak kelas

## LAPORAN KHUSUS

peserta penuh atau tidak tersedia, peserta langsung diarahkan naik kelas tanpa diberikan penjelasan dan solusinya. Seharusnya yang dilakukan faskes mengarahkan peserta agar tidak terjadi urun biaya sebelum peserta memutuskan bersedia naik kelas dan membayar urun biaya.

Kenaikan satu tingkat kelas sangat merugikan peserta PPU yang perawatannya bisa sampai ke kelas VIP dengan menggunakan sistem CoB yang telah disepakati dengan perusahaan. Aturan ini semakin membuka celah untuk menjebak pasien naik kelas.

Dari sisi pasien yang panik terhadap penyakit yang diderita, ketidaktahuan dan kesalahan peserta naik kelas bisa dihindari. Selisih biaya juga bisa dijadikan jalan pintas bagi fasilitas kesehatan untuk meraup keuntungan menutup biaya operasional atas keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS kesehatan, terang Daryus.

Adanya pelayanan khusus yang bersifat eksklusif juga menjadikan BPJS tidak bisa melakukan monitoring serta menjadikan tingginya kesenjangan hak kesehatan. Padahal BPJS ini untuk menstandarisasi pelayanan kesehatan. Untuk peserta dengan PBI, peserta ter-PHK PPU beserta keluarganya perlu mewaspadai dan mengantisipasi, sebab mereka sudah terbiasa dengan kamar kelas 2.

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyambut baik regulasi ini. Di satu sisi aturan itu bisa mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oknum rumah sakit, tenaga medis, ataupun peserta. Juga perlu diwaspadai munculnya biaya ilegal yang tidak dicover BPJS. Bisa jadi ada eksploitasi pasien, misal bisa melahirkan normal dilakukan sesar atas bujuk rayu dokter. Ada kepentingan ekonomi di balik itu, terang Tulus.

### Menjaga Keseimbangan

Kondisi itu efek dari defisit yang dialami BPJS Kesehatan, yang membuat banyak pihak untuk berobat dengan memakai BPJS Kesehatan tak lagi gratis. Hingga 1 Januari 2019, peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar mencapai 215,9 juta, yang didukung 29.189 fasilitas



Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan.

kesehatan (9.931 pukesmas, 2.237 rumah sakit, 6.535 klinik pratama, dan 5.338 dokter praktik per orang).


Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris mengungkapkan di tahun 2018 mengalami defisit yang mencapai Rp 16 triliun. Terbitnya Permenkes 51 memang mendasarkan diri pada pertimbangan yang matang, banyak kepentingan yang memerlukan perhatian. Mulai kepentingan masyarakat untuk mengakses kesehatan, rumah sakit, profesi dokter, para medik, industri farmasi serta keuangan negara.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah melalui aturan itu untuk menjaga keseimbangan. Dukungan ABPN pun dilakukan untuk mendukung kesehatan masyarakat, namun tidak mungkin ada pemerataan tanpa ada akses kesehatan yang baik, jelas Sri Mulyani.

Untuk itu masyarakat, terang Sri tidak perlu khawatir, pemerintah akan terus berupaya menjaga semua kepentingan. Menutup defisit BPJS Kesehatan yang terjadi dengan menambah anggaran, sambil memperbaiki tatakelola BPJS, dan melakukan audit tagihan BPJS oleh BPKP.

Ini untuk menjamin agar masyarakat mendapat jaminan kesehatan sesuai yang diharapkan. Dan menyesuaikan dengan kemampuan biaya yang sustainable, terang Sri Mulyani.

Hingga kini pengenaan urun biaya belum diberlakukan. Sebab, jenis layanan yang dikenakan urun biaya diusulkan oleh asosiasi rumah sakit, BPJS dan organisasi profesi belum dilakukan. Pemerintah membentuk tim khusus untuk mengkaji sistem urun biaya dalam penggunaan BPJS Kesehatan. Tim kajian terdiri dari berbagai lembaga termasuk organisasi profesi dan asosiasi fasilitas kesehatan. Yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persi, Akademisi, dan Kemenkes. Tidak hanya mendisiplinkan pasien peserta jaminan kesehatan nasional, pemerintah juga menertibkan penyelenggara jasa layanan kesehatan yang ditemukan nakal.

Dengan banyaknya pihak yang terlibat, kebocoran layanan kesehatan tidak bisa dibiarkan. Sebab BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran mencapai Rp 10,9 triliun pada tahun 2019 ini. 





Masyarakat kerap mengeluhkan rujukan *online* yang diberlakukan BPJS Kesehatan.

## Revisi Rujukan *Online* BPJS Kesehatan

*Permenkes 51 Tahun 2018, berlaku hanya untuk peserta non PBI atau bayar mandiri. Namun, mengecualikan peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta yang didaftarkan pemerintah daerah. Namun, mereka kerap mendapat keluhan masyarakat terkait rujukan berjenjang online BPJS Kesehatan.*

**D**ari sisi pemberlakuan Permenkes 51, Pemerintah Daerah memang tidak kena dampak langsung. Namun, pemerintah daerah kerap disibukkan dengan keluhan masyarakat terkait rujukan berjenjang yang diberlakukan BPJS Kesehatan. Di mana prosesnya menjadi lebih panjang dan rumah sakit kesulitan memanfaatkan layanan itu.

Peraturan Direktur Jaminan

Pelayanan Kesehatan BPJS 2018, mengatur rujukan berobat disyaratkan melalui rumah sakit tipe D sebelum ke tipe C, B dan A. Sebelumnya masyarakat bisa memilih rumah sakit rujukan yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Contoh, pasien yang tinggal dekat dengan rumah sakit tipe A misalnya. Tidak bisa langsung merujuk ke situ, namun mencari rumah sakit tipe D. Pasien itu bisa masuk ke kelas lebih tinggi sebelum mendapat rujukan dari rumah sakit tipe yang lebih rendah. Dari situ pasien akan

menjalani pemeriksaan medis mulai dari awal lagi. Apalagi, rumah sakit rujukan tidak memiliki rekam medis pasien.

Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), Wilayah Jawa Timur, Dodo Anando seperti dilansir media *online* mengatakan mekanisme rujukan *online* peserta BPJS ini bukan hanya berdampak pada pasien, namun juga rumah sakit. Pasien rumah sakit tipe D dan C bisa membludak, sedangkan tipe B bisa kekurangan pasien. Kondisi ini jelas akan berpengaruh terhadap operasional dan ketersediaan obat yang dipakai. Distributor obat bisa mengunci obat yang berpengaruh terhadap operasional rumah sakit. Untuk rumah sakit pemerintah tidak akan terlalu berdampak, kebanyakan rumah sakit tipe B milik swasta.

Pemberlakuan rujukan *online*, sempat membuat Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan Persatuan Rumah

## LAPORAN KHUSUS

Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Wilayah Jawa Timur melakukan protes terhadap regulasi itu. Begitu juga Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Provinsi Jawa Tengah, juga melakukan protes terhadap kebijakan rujukan berjenjang *online* BPJS Kesehatan. Alasan penolakan tidak lain pelayanan kesehatan yang dilakukan berdasarkan kelas rumah sakit, bukan berdasarkan kompetensi dan jarak.

Sekretaris Arsada Jateng, Susi Herawati mengakui banyak menerima keluhan pasien peserta BPJS Kesehatan lantaran sulitnya mendapatkan akses pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, terutama di rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe B.

Dengan demikian, masyarakat tidak mendapatkan layanan yang adil dan diperlakukan secara diskriminatif, karena tidak ada pilihan rumah sakit yang diinginkan. Sementara, pemerintah daerah terus berupaya memenuhi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat. Ini membuat investasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Aturan itu menekankan semua rujukan penyakit dalam diarahkan ke rumah sakit tipe D hingga maksimal, baru kemudian meningkat ke tipe C. Rumah sakit yang bisa bertahan adalah rumah sakit kecil dengan peralatan sederhana dan berbiaya murah. Padahal spesialis penyakit dalam di RS tipe B tidak akan menerima pasien, kecuali ke subspecialis metabolik endokrin dan Ginjal Hipertensi, terang Susi.

Aturan rujukan *online* BPJS Kesehatan, menurut BPJS Kesehatan, diarahkan untuk memastikan peserta JKN-KIS mendapatkan layanan tepat, berkualitas sesuai kompetensi yang dimiliki pemberi pelayanan kesehatan. Juga memudahkan dan memastikan peserta memperoleh layanan di rumah sakit sesuai kompetensinya, jarak dan kepastian rumah sakit rujukan sesuai kebutuhan medis.

Rujukan *online*, itu dikeluarkan lantaran di lapangan jumlah rumah sakit dan penyebarannya belum merata, serta kompetensi setiap rumah sakit yang tidak sama. Sedangkan program JKN-KIS memberikan program layanan kesehatan sesuai kebutuhan medis



Peserta BPJS Kesehatan memperlihatkan aplikasi Mobile JKN di *handphone*-nya.

peserta berdasarkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Dengan rujukan *online*, peserta dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai kompetensi layanan kesehatan yang dibutuhkan. Bisa pula dilanjutkan ke dokter spesialis di kelas rumah sakit di atasnya. Jika dikehendaki layanan medis di rumah sakit yang lebih tinggi bisa langsung di rumah sakit tipe B atau A. Rujukan *online* ini sangat bermanfaat bagi peserta, fasilitas kesehatan, kepastian layanan, dengan kompetensi dan radius terdekat. Ini juga bisa mengatasi rujukan berulang karena alasan minim SDM dan sarana yang dibutuhkan. Juga mengatasi antrian yang menumpuk di rumah sakit.

Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), rujukan *online* bisa membantu FKTP melakukan rujukan yang sesuai dengan kompetensi dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Dan mengurangi antrian panjang. Dengan ini, layanan administrasi bisa meningkat, *real time* dari FKTP ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Data dari P-Care di FKTP langsung terkoneksi ke FKRTL sehingga memudahkan analisis data calon pasien. Selain itu, dengan sistem rujukan *online* meminimalisir kemungkinan kendala yang

terjadi akibat pasien lupa membawa surat rujukan. Rujukan *online* memperbaiki sistem rujukan berbasis kompetensi yang masih sulit diimplementasikan.

Regulasi baru, rujukan *online* BPJS Kesehatan, jelas membuat masyarakat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Yang sebelumnya bisa langsung mendapat fasilitas kesehatan di rumah sakit tipe B atau A, kini harus turun ke bawah. Dan ini menjadi kesulitan di daerah, di mana penyebaran, kompetensi, dan terbatasnya rumah sakit di daerah menjadi kendala.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah III (Komwil III), yang mewadahi pemerintah kota di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Banten, pada Rapat Kerja di Semarang 29 Maret 2019 lalu, menetapkan rekomendasi terkait rujukan *online* BPJS Kesehatan. Di mana terkait mekanisme rujukan BPJS, di mana pasien harus dirujuk ke rumah sakit tipe C terlebih dahulu, tidak langsung ke rumah sakit tipe B.

Atas aturan itu, para walikota Komwil III meminta BPJS Kesehatan melakukan revisi ulang terhadap regulasi yang telah dikeluarkan, yang berpotensi menghambat kelancaran layanan kesehatan di daerah. **K**





Indonesia-Australia Smart City Forum 2019.

# Terbukanya Peluang Kerjasama

*Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) berkolaborasi dengan Austrade, menggelar Indonesia-Australia Smart City Forum 2019 – mewujudkan Smart City dan sustainable Cities di Indonesia.*

Indonesia-Australia Smart City Forum 2019, digelar di Kedutaan Australia di Jakarta. Kegiatan itu diinisiasi Australian Trade and Investment Commissions (Austrade), dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Forum ini dihadiri peserta dari 22 pemerintah kota di Indonesia, 9 pelaku bisnis IT dari Australia dan Dewan Kota Cerdas (*Smart City Council*) Australia dan Selandia Baru, serta peserta Austrade untuk kegiatan IASCF 2019.

Kegiatan itu lanjutan dari audiensi Austrade dengan Pengurus APEKSI pada 15 Februari 2019 lalu di Sekretariat APEKSI. Pihak Austrade mengajak

kolaborasi peserta anggota APEKSI baik untuk kegiatan Smart City Forum 2019 yang digelar di Kedutaan Australia di Jakarta. Juga pada perhelatan akbar Asia Pacific Summit 2019, pada 7-10 Juli 2019, di Bresben, Australia.

Selain membahas Indonesia-Australia Smart City Forum 2019, pada kesempatan tersebut juga dilangsungkan penandatanganan perjanjian kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Australia, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) di Jakarta, Senin 4 Maret 2019.

Penandatanganan CEPA itu dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan,

Pariwisata, dan Investasi Australia, Simon Birmingham, yang disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Enggartiasto Lukito menjelaskan perjanjian kerjasama ini menunjukkan keseriusan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Australia selama ini, yang saling menguntungkan di bidang perdagangan dan jasa. Melalui perjanjian ini menghilangkan 100% tarif dari Australia, dan 94% tarif dari Indonesia akan dihapus secara bertahap. Ditekenya kerjasama ini mendorong mobilisasi barang dan jasa semakin meningkat antar dua negara. Pintu dibuka baik Indonesia ke Australia, atau sebaliknya.

CEO Australian Trade and Investment Commission (Austrade) Pemerintah Australia, Stephanie Fahey mengatakan melalui Indonesia-Australia Smart City Forum, pihaknya ingin menjajaki peluang kemitraan dengan daerah di Indonesia yang memiliki potensi.

Lebih lanjut, Menteri Perdagangan,

## INFO APEKSI

Pariwisata, dan Investasi Australia, Senator The Hon Simon Birmingham menyampaikan forum ini menjadi bagian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia.

Indonesia, terangnya memiliki peluang besar menjadi mitra bisnis, utama bidang *smart city*. Pelaku bisnis IT Australia berharap bisa berbagi pengalaman membangun *smart city* di Indonesia. Melalui forum ini diharapkan terjadi kolaborasi bisnis Indonesia-Australia, pemerintah daerah bisa menjembatani kepentingan pelaku bisnis Indonesia dan Australia di berbagai bidang strategis, mulai sektor infrastruktur, perdagangan, *e-commerce*, terang Simon.

Presentasi dilanjutkan dengan paparan Asean Mission 2019, dari Chairman of APIC (Indonesia Smart Initiatives Association), Suhono Supangkat, Garuda Smart City Framework-nya. Dilanjutkan presentasi pelaku bisnis *smart city* dari Australia, Dewan Smart City Australia dan Selandia Baru, Pemerintah Kota Jambi dan Jogjakarta.

Dalam pemaparannya, Walikota Jambi, Syarif Fasha menyampaikan bahwa pengembangan kota cerdas mengacu pada efisiensi dan efektifitas. Kota pintar bukan hal baru, sebab di kota ini sudah banyak layanan yang dilakukan secara *online*. Membuat kota pintar, butuh



Para walikota anggota APEKSI menghadiri Indonesia-Australia Smart City Forum 2019.

perencanaan yang matang. Konsep kota pintar selalu ada di setiap misi Kota Jambi.

Untuk mewujudkan kota pintar, Syarif Fasha menambahkan Kota Jambi membuat 26 peraturan daerah yang mendukung implementasi *smart city*, dan melibatkan tiga kerjasama. Kota Jambi juga menghadapi tantangan serupa dengan kota lain. Seperti ledakan populasi penduduk, daya dukung transportasi dan infrastruktur yang kurang memadai, kualitas layanan publik.

Di sisi lain, untuk menyelesaikan masalah itu, Kota Jambi menghadapi minim sumber daya keuangan. Untuk

menyelesaikan masalah itu, melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dengan menciptakan kota cerdas. Penerapan kota pintar, terang Fasha, tergantung komitmen pemimpin daerah meningkatkan inovasi layanan publik. Inovasi harus mengakar di masyarakat dari dan untuk masyarakat, agar terjaga keberlanjutan inovasi tersebut.

Dengan terbukanya peluang kerjasama, antara Indonesia dengan Australia, diharapkan, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kerjasama, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan teknologi informasi untuk mensejahterakan masyarakatnya. **K**



Peserta Indonesia-Australia Smart City Forum 2019 yang digelar di Kedutaan Australia di Jakarta.



# KTT Kota-Kota & Forum Wali Kota Se-Asia Pasifik 2019

(The 2019 Asia Pacific Cities Summit)

Brisbane, Australia  
7-10 Juli 2019

## Highlight APCS 2019


Terhubung dengan lebih dari 1000 pemimpin kota dan pembuat keputusan utama di KTT Kota-Kota (APCS 2019) & forum wali kota se-Asia Pasifik ke-13.

Berfokus pada pembangunan kota melalui bisnis & inovasi, Forum wali kota akan memberikan kesempatan eksklusif untuk saling terhubung-menyusun agenda perkotaan di kawasan. Jangan lewatkan kesempatan berdiskusi bersama para pakar pemerintahan, bisnis & industri internasional

### Inclusive of

- Airlines ticket domestic by Garuda Indonesia
- Airlines ticket international by Virgin Airlines
- Registration fee APCS 2019
- Accommodation
- Transportation
- City tour + Meals during City Tour
- Visa arrangement

Registration date: March 8 - May 31. 2019

 Komp.Malibu Square No,A 10 Jl.Pahlawan Seribu,  
BSD City , Serpong, Tangerang Selatan 15 321

## Itinerary

### Alternatif Pertama

- 6 Juli 2019 : Penerbangan Jakarta - Brisbane
- 7 - 10 Juli 2019 : Tiba di Brisbane ( Acara KTT Kota - Kota & Forum walikota se-Asia Pasifik
- 11 Juli 2019 : Kepulangan ke Jakarta

### Alternatif Kedua

- 6 Juli 2019 : Penerbangan Jakarta - Brisbane
- 7 - 10 Juli 2019 : Tiba di Brisbane Acara KTT Kota - Kota & Forum Walikota Se-Asia Pasifik 2019
- 11 Juli 2019 : City Tour  
- South Bank Brisbane, City Hall Lights  
- Makan Siang  
- Story Bridge, Market Queen Street
- 12 Juli 2019 : Kembali ke Indonesia

# Kerjasama Luar Negeri, Hemat Anggaran Pembangunan



Pelatihan diplomasi kota bertema “Peran Strategis Pemerintah Daerah Sebagai Pemain Global”.

*Pemerintah kota belum banyak mengoptimalkan kerjasama luar negeri untuk menggenjot pembangunan. Padahal melalui kerjasama, anggaran pembangunan bisa dihemat, layanan menjadi optimal.*

Trotoar atau pedestrian Kota Semarang, terlihat ramah pejalan kaki, luas, nyaman, terdapat sentuhan seni, sejuk dengan rindangnya pepohonan. Sepanjang hampir 7 km, trotoar itu sebagian hasil kerjasama dengan Pemerintah Kota Jung Gu Ulsan, Korea Selatan. Melalui kerjasama *sister city*, Pemkot Semarang mendapat bantuan *technical assistance* untuk membangun trotoar, juga jembatan banjir kanal barat. Anggaran untuk membiayai teknik pun bisa dihemat.

Banyak contoh kerjasama luar negeri yang dilakukan pemkot menuai sukses. Namun masih banyak pula pemerintah daerah yang enggan atau belum siap melakukan kerjasama. Minimnya kapasitas aparatur daerah, ditengarai menjadi penyebab daerah belum banyak melakukan kerjasama. Meskipun secara regulasi, pemerintah pusat telah mengatur cukup lengkap, kerjasama daerah dengan

luar negeri.

Untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong kerjasama luar negeri, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bersama *United Cities & Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC)*, memfasilitasi pemerintah kota dengan Pelatihan Diplomasi Kota. Pelatihan mengangkat tema “Peran Strategis Pemerintah Daerah Sebagai Pemain Global”, itu berlangsung 18-19 Desember 2018 di Jakarta.

Pelatihan itu menghadirkan pembicara dari UCLG ASPAC, Uni Eropa di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, APEKSI dan Citiasia Inc. Dan diikuti peserta dari Pemerintah Kota Batam, Jambi, Surabaya, Pangkal Pinang, Surakarta, Banda Aceh, Bau-Bau dan perwakilan dari Universitas Lampung. Sedangkan Pemerintah Provinsi yang terlibat antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Jawa Barat.

Direktur Eksekutif APEKSI, Sri Indah Wibi Nastiti mengungkapkan selain membekali kapasitas pemerintah kota melakukan kerjasama luar negeri. Pelatihan itu juga membekali aparatur kota mengimplementasi SDGs, perubahan iklim dan ketahanan energi perkotaan. Peserta juga berkesempatan saling bertukar *best practice* pengelolaan SDGs di daerahnya.

Pelatihan ini, terang Indah merupakan kesempatan bagi aparatur meningkatkan kapasitas menyerap pengalaman terbaik implementasi SDGs di setiap kota. Untuk merealisasi SDGs, kapasitas aparatur pemerintah terus ditingkatkan agar mampu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, juga melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Sejatinya Kementerian Luar Negeri dan perwakilan pemerintah di luar negeri siap membantu daerah menjembatani kerjasama daerah dengan luar negeri. Baik sebagai informan, mediator, promotor, fasilitator, advisor, hingga penyusunan drafting kerjasama.

Asal kerjasama itu dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomasi, objek yang dikerjakamkan urusan pemerintah daerah, pemda tidak membuka kantor di luar negeri dan tidak mencampuri urusan dalam negeri yang diajak kerjasama. Program kerjasama *in-line* dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, kerjasama saling menguntungkan dan melengkapi, ada alih teknologi, hingga meningkatkan hubungan antar masyarakat kota yang bekerjasama.

Kementerian Luar Negeri dari 1999-2018, mencatat kerjasama teknik yang telah dilakukan sebanyak 539 program, 7017 peserta dari 90 negara. Kerjasama melalui pelatihan lokakarya, pemagangan dan pengiriman tenaga ahli. Bidangnya mencakup pertanian, kelautan dan perikanan, energi, demokrasi dan *good*



*governance*, infrastruktur dan *disaster risk management*. Dari kerjasama itu, kementerian ini mencatat ada peningkatan kapasitas, terjadi tukar menukar tenaga ahli, alih teknologi, nilai tambah ekonomi, juga promosi kapasitas daerah.

Proses kerjasama didahului dengan adanya prakarsa, baik dari pemerintah daerah, pemda di luar negeri, lembaga asing atau perwakilan RI di luar negeri. Dengan prakarsa itu, kemudian pemkot melakukan peninjauan terkait peluang dan manfaat, penyusunan kajian rencana kerjasama. *Letter of intent* tindak lanjut dengan penandatanganan Lol, melakukan konsultasi ke pemerintah pusat (Kemendagri, Kemenlu, K/L terkait). Lalu pemerintah daerah menyusun rencana kerjasama, yang dimintakan persetujuan ke DPRD. Baru Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi rencana kerjasama yang disetujui DPRD.

Pelatihan diplomasi kota ini, banyak membekali aparatur kota bagaimana meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dengan luar negeri yang terencana dan efektif. Pelaksanaan kerjasama luar negeri yang terukur, kebijakan dan diplomasi yang dilakukan, hingga mendorong pemerintah daerah menjadi pemain global.

### **Kerjasama Hemat Anggaran**

Tanpa kerjasama luar negeri, pembangunan daerah belum optimal. Adanya kerjasama bisa mendorong promosi pariwisata, hubungan ekonomi, perdagangan, teknologi dan budaya. Tujuan hubungan kerjasama luar negeri yang dilakukan pemda, tidak lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antara *people to people* dan *business to business*. Dengan begitu terjadi interaksi, yang saling menguntungkan, mendorong terjadinya transaksi dan memberi pemasukan ke daerah.

Kerjasama luar negeri, seperti diatur UU 23 Tahun 2014, cukup jelas bahwa pemerintah daerah sebatas melakukan kerjasama internasional, bukan perjanjian internasional. UU itu mengikat daerah yang melakukan kerjasama luar negeri wajib mendapat persetujuan pemerintah pusat, yang dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri. Prinsip kerja sama



Peserta pelatihan diplomasi kota yang digelar di Jakarta, 18-19 Desember 2018.

mengacu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan publik dan saling menguntungkan (PP 28 Tahun 2018).

Sedangkan objek kerjasama mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pertukaran budaya; peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; promosi potensi daerah; objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kerjasama luar negeri *sister city* bisa inisiasi dari pemda. Pemda yang sudah melakukan *sister city* seperti Provinsi Jawa Barat dengan Heilongjiang, RRT; Provinsi Sumatera Utara dengan Bekes, Hungaria; Kota Surabaya dengan Liverpool, UK; Kota Semarang dengan Jung Gu Ulsan, Korea Selatan; Kota Bandung dengan Kota Suwon, Korea Selatan; Sumatera Barat dengan Fes Boulemane (Fez Meknes) Kerajaan Maroko dan lainnya.

Selain inisiasi pemda, kerjasama teknik bisa inisiasi pemerintah pusat yang diteruskan ke pemerintah daerah. Seperti kerjasama pemda dengan luar negeri seperti dengan organisasi internasional dan lembaga asing yang ada di Kemendagri. Seperti lembaga keuangan internasional, organisasi internasional, kerjasama badan swasta asing, dan LSM asing.

Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Nelson Simanjuntak menjelaskan saat ini trend bidang kerjasama mencakup layanan publik, promosi pariwisata dan kebudayaan, lingkungan hidup (energi terbarukan, pengelolaan sampah/limbah, air bersih) *capacity building*, tata kelola pemerintah.

Namun demikian, Nelson menambahkan isu terkait kerjasama luar

negeri masih banyak diwarnai kurangnya SDM yang memadai dalam menangani kerjasama. Daerah kurang tertib administrasi terkait proses registrasi dan penatausahaan hibah, bidang kerjasama tidak sesuai dengan potensi daerah, pemda kurang mendukung pendanaan yang menjadi prioritas kerjasama, perjanjian kerjasama hanya bersifat seremonial, program kerjasama kurang terjamin keberlanjutannya, replikasi program kerjasama tidak terbentuk. "Pemda kurang komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat," terangnya.

Kota yang melakukan kerjasama luar negeri sebetulnya sudah banyak. Seperti, Pemerintah Kota Semarang kerjasama dengan Pemerintah Kota Toyama, Jepang. Kota ini mendapat bantuan penurunan emisi CO<sub>2</sub>. Trans Semarang tahun 2018 yang memiliki 7 koridor, tahun 2021 merencanakan 12 koridor. Bus Trans Semarang akan dikonversi ke *compressed natural gas* (CNG) yang berada di koridor 1, 5, 6, dan 7 dengan total 72 bus. Investasi yang dikeluarkan sekitar Rp 9,4 miliar. Pemda hanya mengeluarkan 50% dari total anggaran.

Sedangkan Provinsi Jawa Barat, kerjasama *sister city* dengan Kota Nanjing, RRT. Bentuk kerjasama pertukaran budaya sam poo kong. Sedangkan, Kota Bandung dengan Kota Suwon Korea, PAUD Dahlia di Sukamulya, Cinambo. Pembangunan PAUD dilakukan LPM Sukamulya dengan Universitas Kyonggi, Suwon Korea. Masih banyak bentuk kerjasama luar negeri yang mampu menghemat anggaran daerah. Kerjasama luar negeri lain yang sudah terjalin di antaranya DKI Jakarta, Surabaya, Bogor, Makassar, dan lainnya. ❏

# Membangun Pengelolaan Air Perkotaan Terintegrasi



Lokakarya Pengelolaan Air Perkotaan Terpadu (PAPT) di Jakarta, 28-29 Januari.2019.

*Kebutuhan air bersih di perkotaan menjadi tantangan serius. Air tanah semakin menurun, berdampak pada minimnya ketersediaan sumber air. Rekayasa pengolahan air permukaan (hujan) layak dilakukan agar tidak terbuang percuma.*

**A**sosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, yang didukung *World Bank*, menyelenggarakan lokakarya Pengelolaan Air Perkotaan Terpadu (PAPT) atau *Integrated Urban Water Management (IUWM)*, Jakarta-Bogor, selama 5 hari.

Kegiatan yang dimulai 28 Januari-1 Februari 2019 lalu itu dibagi dua agenda. Pertama, lokakarya nasional dilakukan di Jakarta selama dua hari, 28-29 Januari. Sedangkan lokakarya teknis yang diikuti 15 peserta dari 7 pemerintah kota, dilaksanakan di Kota Bogor. Kegiatan untuk menginformasikan pentingnya Pengelolaan Air Perkotaan Terpadu, yang sudah disepakati di tingkat nasional dan yang harus diterapkan di tingkat daerah, serta portofolio proyek pengelolaan air perkotaan terpadu.

Direktur Perkotaan, Perumahan,

Pemukiman, Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti saat membuka lokakarya mengatakan mengelola air di perkotaan menghadapi sejumlah tantangan. Penyediaan akses universal layanan dasar air bersih memerlukan kolaborasi semua pihak.

Kota, terang Tri Dewi Virgiyanti, menghadapi tantangan tingginya urbanisasi, masih rendah atau sepertiga, masyarakat perkotaan yang bisa menikmati layanan air minum perpipaan. Kebutuhan air rumah tangga masih mengandalkan sumber konvensional, belum mengoptimalkan sumber air non-konvensional. Padahal 74% kebutuhan air minum rumah tangga yang bersumber dari air tanah hanya 2,7%. Kualitas air menurun dan sumber daya air semakin terbatas, risiko perubahan iklim dan bencana, serta terbatasnya kapasitas pemda mengelola air. "Terjadi pemborosan penggunaan air, pemanfaatan air tanah berlebih," jelas Tri Dewi.

Untuk itu, pengelolaan air, terang Tri Dewi, tak bisa berdiri sendiri. Sebab, pengelola air yang terlihat mudah ternyata rumit dan kompleks. Banyak isu yang menyertai, juga melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Sebagai pengelola air, PDAM sendiri tidak bisa memastikan ketersediaan air. Ini membutuhkan keterlibatan semua *stakeholder* di antara masyarakat pengguna, pengganggu air, juga pelestari air, dinas pengolah limbah, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Pemerintah daerah menjadi pihak pengendali pasokan aman dan berkelanjutan. "Pengelolaan air di perkotaan melibatkan banyak kepentingan dan *stakeholder*, serta melibatkan banyak isu," jelas Tri Dewi Virgiyanti.

Sinergi pengelolaan air perkotaan terpadu melibatkan pemangku kepentingan, dilakukan *diagnostic*, dibuat strategi dan perencanaan, dan implementasi untuk rencana aksi. Juga aspek ekonomi, keuangan dan tantangan di perkotaan.

Peserta lokakarya di Jakarta banyak mendapat materi baik dari Kementerian PPN/Bappenas, *World Bank*, Kementerian PUPR terkait strategi operasional dan implementasi manajemen air, juga pengalaman dari Pemerintah Kota DKI Jakarta, Semarang dan Tangerang. Juga diberikan pengalaman *best practice* dan perjalanan pengelolaan air perkotaan terpadu di negara Australia, Singapura dan Jepang.

Lokakarya ini menggarisbawahi pentingnya dilakukan pengembangan sumber daya air alternatif, penggunaan air yang efektif, juga peningkatan sistem pasokan air. Di mana air masih dipandang sebagai benda sosial bukan ekonomi, yang akan menjadi masalah dan kebutuhan bersama.

## Sumur Resapan

Walikota Bogor, Bima Arya, dalam lokakarya di Bogor berbagi pengalaman bagaimana pemerintahannya menangani air dan sanitasi. Kota Bogor seluas 11.850 ha, di mana 13 ha-nya area pemukiman



dihuni 1,1 juta penduduk, PDAM-nya sudah melayani 91,44% kebutuhan air atau sekitar melayani 160 ribu pelanggan. Untuk menjaga ketersediaan air baik dari sisi kualitas dan kuantitas, Pemerintah Kota Bogor menata dan merehabilitasi lingkungan, aliran sungai sebagai sumber pasokan air bebas limbah industri, rumah tangga dan lainnya.

Bima lebih banyak memaparkan program yang dilakukan terkait lingkungan hidup. Salah satunya melakukan naturalisasi Sungai Ciliwung. Sungai ditempatkan di muka bukan lagi dibelakangi. Diharapkan dengan tidak mencemari sungai, kualitas hidup warga Kota Bogor semakin meningkat. Dengan tidak membuang limbah ke sungai, pemerintah kota akan banyak membangun MCK, sanitasi dan infrastruktur lain. Dan anggaran dikonsentrasikan ke sana, terang Bima.

Dua, tiga tahun mendatang, Bima berharap wajah Sungai Ciliwung menjadi asri, dan dikembangkan menjadi wisata air dan kampung tematik yang terintegrasi. Kota ini juga akan memperbanyak sumur resapan, mengurangi dampak banjir di hulu sungai.

Mengawali hari kedua lokakarya, 30 Januari 2019, *USAID Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene* Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (IUWASH PLUS), memaparkan materi *water safety and groundwater management and recharge*. IUWASH PLUS mendorong gerakan pembuatan sumur resapan untuk mengatasi penurunan air tanah. Langkah ini untuk mengerem laju penurunan air tanah yang semakin mengkhawatirkan terjadi di Pulau Jawa. Ini akibat *over pumping* yang dilakukan industri dan rumah tangga (meningkatnya populasi dan urbanisasi). Kerusakan dan perubahan tata guna lahan, dampak perubahan iklim dan kemarau panjang.

Mata air dan sungai banyak yang mengering, yang berpengaruh terhadap akses dan ketersediaan air bersih. "Yang jelas akan berpengaruh terhadap pelayanan dan penambahan sambungan (PDAM) dan program 4K tidak tercapai," terangnya.

Dengan sumur resapan, cadangan air tanah, sumur galian, mata air dan



Peserta lokakarya teknis yang diikuti 15 peserta dari 7 pemkot, dilaksanakan di Kota Bogor.

sungai semakin bertambah. Menjaga dan menghidupkan kembali mata air dan sungai yang kering. Menjaga kualitas air, mengatasi banjir dan kekeringan, menghentikan intrusi air laut, dan penurunan muka tanah.

IUWASH PLUS memaparkan sumur resapan mata air Senjoyo, Kota Salatiga. Setelah tiga tahun terjadi peningkatan debit mata air. Tahun 2015 debit mata air Senjoyo hanya 800 liter/detik, di tahun 2017 meningkat menjadi 1.100 liter/detik.


Disusul World Bank dengan materi Slump Upgrading & Resettlement and Geo-Spatial. Lalu dilanjutkan dengan diskusi kelompok terkait *strategic planning* dan *visioning*.

Pada siang hari dilanjutkan dengan pemaparan dari World Bank-IUWM in World Bank Project, serta Online IUWM Platform. Baik pendanaan dari World Bank program pelatihan secara *online* bisa diakses pemerintah kota untuk meningkatkan Pengelolaan Air Perkotaan Terpadu dengan sanitasinya. Dari pemaparan sesi ini pemerintah kota melakukan diskusi dan membuat rencana aksi untuk kota masing-masing.

Lokakarya ini membekali peserta dari PDAM masing-masing pemerintah kota dengan materi analisa ekonomi

dan keuangan, penilaian ekonomi-analisis biaya dan manfaat, risiko dan ketidakpastian serta pembuatan keputusan, analisa keuangan, pembiayaan (dari pendanaan dari utang dan ekuitas, serta risiko yang melekat, peluang kontrak, pengadaan, dan kerjasama publik-swasta. Hingga diberikan IUWM Simulation Game-Economic and Financial Model-nya.

Hari ketiga dilakukan presentasi dari Pemerintah Kota Palembang, Banjarmasin, Tangerang, DKI Jakarta, Balikpapan dan Bogor. Pemaparan dari setiap kota dilakukan pembahasan dan didiskusikan bersama. Semua pemerintah kota memaparkan program dan aksi, juga peluang dan hambatan yang dimiliki. Seperti di bidang SPAM/PDAM dan sanitasi. Program, peluang dan tantangan mendapat penyempurnaan dari World Bank.

Pengelolaan Air Perkotaan Terpadu atau IUWM, membutuhkan ilmu dan pengetahuan, teknologi, pendanaan, serta modul yang mudah dipahami. World Bank membuka semua akses baik pendanaan, untuk meningkatkan kapasitas SPAM dan PDAM, membuat sumur resapan, teknologi pengelolaan air bersih, hingga mengakses pelatihan dan informasi lintas negara untuk meningkatkan integrasi pengelolaan air bersih. 



*Training of Trainers (ToT), pengurangan risiko bencana, mewujudkan kota tangguh bencana di Indonesia, 29-30 Januari 2019 di Kota Bogor.*

# Mempersiapkan Kota Tangguh Bencana

*Membangun kota tangguh bencana suatu keharusan dan tanggung jawab semua pihak. Pembangunan yang mampu mengintegrasikan SDGs, pengurangan risiko bencana dalam proses pembangunan, tampil sebagai kota yang tangguh menghadapi bencana.*

**M**engingat dampak perubahan iklim, akhir-akhir ini memberikan pengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), bersama UCLG ASPAC yang didukung *United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)* menyelenggarakan *Training of Trainers (ToT)*, pengurangan risiko bencana, mewujudkan kota tangguh

bencana di Indonesia. Training yang berlangsung, 29-30 Januari 2019 di Kota Bogor ini mengangkat tema *"Making Cities Sustainable and Resilient: Implementing the Sendai framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 at the local level"*.

Tejas Tamobhid Patnaik dari UNISDR, menjelaskan wilayah kota menghadapi kerentanan terhadap risiko bencana. Perkotaan menghadapi peningkatan jumlah penduduk yang tinggi. Peningkatan itu tidak dibarengi dengan kesiapan sumber daya yang mampu

mengurangi risiko bencana. Program perubahan risiko bencana lintas sektor masih dianggap sebagai pemborosan anggaran. Investasi yang dikeluarkan dianggap belum mampu mengurangi risiko bencana.

Untuk mencapai kota tangguh, Tejas Tamobhid Patnaik menambahkan perlu dilakukan aksi oleh pemerintah daerah mengurangi risiko bencana. Yaitu dengan mulai dari mengetahui lebih banyak. Dengan pengetahuan itu, untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat perkotaan terhadap risiko yang dihadapi.

Lalu bagaimana opsi pengurangan risiko bisa dilakukan? Tejas menyinggung investasi yang bijak untuk pengurangan risiko bencana. Pemerintah baik pusat dan daerah meningkatkan komitmen untuk menciptakan layanan, proyek infrastruktur dan anggaran yang mengandung



aspek pengurangan risiko bencana. Pembangunan bisa dilakukan lebih aman, mendorong perencanaan pembangunan yang partisipatif dan melindungi infrastruktur penting. "Perubahan upaya mitigasi bencana harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai kebijakan, penyediaan dana mitigasi, ketaatan pembangunan berbasis zonasi aman-rawan bencana, hingga pendidikan dan pelatihan evakuasi bencana," terangnya.

Meningkatnya kesadaran dan aksi yang digerakkan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko dan membangun ketangguhan. Memberikan penghargaan yang lebih besar terhadap aksi yang dilakukan pemerintah daerah memadukan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan manajemen risiko iklim dan pembangunan berkelanjutan. "Pendekatan lebih terpadu untuk membangun ketangguhan daerah mengatasi program sektoral, terangnya.

Aset-aset dan infrastruktur penting di kota teridentifikasi dan terlindungi dengan baik. Kampanye kota tangguh dengan mengenali 10 hal penting, berorganisasi untuk ketahanan bencana, identifikasi, pahami dan gunakan skenario risiko saat ini dan di masa depan, memperkuat kapasitas keuangan untuk ketahanan, kejar pengembangan dan desain kota yang tangguh, jagalah *buffer* alami untuk meningkatkan fungsi perlindungan yang ditawarkan oleh ekosistem alami, memperkuat kapasitas kelembagaan untuk ketahanan, memahami dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk ketahanan, tingkatkan ketahanan infrastruktur, memastikan kesiapsiagaan dan respon bencana yang efektif dan mempercepat pemulihan dan membangun kembali dengan lebih baik.

Pengelolaan sumber daya air, sistem drainase, limbah padat belum memadai, bisa memicu kerawanan kesehatan, banjir, dan tanah longsor. Ekosistem yang menurun akibat aktivitas pembangunan mengancam lingkungan rawan menghadapi banjir. Sedangkan usia infrastruktur yang menurun, membuat daya dukungnya semakin lemah. Dampak perubahan iklim yang menaikkan dan menurunkan suhu, curah hujan dan



Para pembicara *Training of Trainers* (ToT).

gelombang ekstrem berpengaruh terhadap frekuensi, intensitas dan cakupan lokasi bencana terkait iklim.

ToT ini memberikan pembekalan peserta dari 20 pemerintah kota di Indonesia. Mulai pengurangan risiko bencana dalam pembangunan berkelanjutan. Tren dan hambatan dalam pengurangan risiko perkotaan dan membuat kota tangguh. Aspek lokal dari Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 dalam koherensi dengan kerangka kerja global lainnya termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peragaan alat penilaian dan diagnosis MCR: Scorecard Penanggulangan Bencana untuk Kota-Kota. Mengembangkan dan menerapkan rencana aksi pengurangan risiko bencana pemantauan dan evaluasi rencana PRB lokal. Selain itu pemerintah kota diajari bagaimana menggali masalah integritas risiko bencana dalam kebijakan pembangunan, yang terkoneksi dengan investasi dan implementasi lintas sektor di perkotaan. Bagaimana

metodologi, praktik mengembangkan rencana pengurangan risiko bencana, dan penerapan pemantauan serta evaluasi di proses perencanaan.

Kota tangguh bencana menjadi komitmen pemerintah terhadap perwujudan pembangunan kota yang berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Pembangunan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Baik pemerintah, akademisi, legislatif, akademisi, bisnis, filantropi, organisasi masyarakat, media harus terlibat untuk mewujudkan kota tangguh bencana. Pemerintah mampu menyampaikan informasi dan risiko bencana lokal kepada masyarakat, teknis evakuasi jika terjadi bencana, melakukan simulasi tanggap bencana, dan membangun infrastruktur mitigasi bencana. **K**

## Raker Komwil III:

# Hasilkan Rekomendasi Penting



Ketua DP APEKSI, Airin Rachmi Diany, didampingi para walikota peserta Raker Komwil III.

*Banyak rekomendasi penting yang dihasilkan peserta Rapat Kerja Komisariat Wilayah III (Komwil III). Mulai dari pembiayaan P3K tidak membebani APBD, perbaikan OSS, revisi UU Retribusi dan Pajak Daerah, hingga optimalisasi BPJS Kesehatan.*

**A**sosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Komisariat Wilayah III (Komwil III) menyelenggarakan rapat kerja. Selain Raker Komwil, pada malam harinya diselenggarakan *launching* Rakernas APEKSI XIV dan Indonesia City Expo 2019 yang digelar di Kota Semarang pada 2-7 Juli 2019 mendatang. Raker Komwil ini diikuti 25 walikota dari daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, yang berlangsung di Hotel PO, Semarang, 29 Maret 2019.

Rapat Kerja Komisariat Wilayah III (Raker Komwil III), dipimpin Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono. Dia mengatakan dalam forum APEKSI kali ini diharapkan bisa mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota. Juga mencari solusi yang terintegrasi baik pemerintah kota dan pemerintah pusat.

Peserta rapat, untuk menghasilkan rekomendasi pun melalui perdebatan yang alot. Sebab, masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah kota. Maka forum APEKSI terus menerus untuk mengkaji regulasi daerah. APEKSI sebagai organisasi sebagai sarana bekerjasama,

tukar menukar informasi dan *best practice* sekaligus jembatan komunikasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Setidaknya ada empat yang mengerucut menjadi pembahasan dalam Rapat Kerja Komwil III. Di antaranya mendorong untuk revisi terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dibebankan ke APBD. Penyempurnaan dan integrasi implementasi *Online Single Submission* (OSS) dengan proses perijinan daerah. Mengusulkan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dana bagi hasil pajak. Peninjauan terhadap mekanisme rujukan BPJS, di mana pasien harus dirujuk ke rumah sakit secara berjenjang dari tipe yang paling bawah.

Sebelum diputus rapat, Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, menyampaikan untuk menambahkan satu rekomendasi, terkait dengan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut untuk meningkatkan sinergi antar daerah, proporsi bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dari sekian persoalan yang dibahas mengerucut rekomendasi eksternal yang mencakup, pertama, mendorong untuk dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terkait dengan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kedua, penyempurnaan dan integrasi implementasi *Online Single Submission* (OSS) dengan proses perijinan daerah. Ketiga, mengusulkan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan



Retribusi Daerah terkait dana bagi hasil pajak, terutama pada proporsi bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Alasannya, lalu lintas kendaraan menjadi beban di perkotaan. Untuk mengatasi kemacetan, perkotaan butuh anggaran yang cukup.

Keempat, peninjauan terhadap mekanisme rujukan BPJS, di mana pasien harus dirujuk ke RS secara berjenjang dari tipe yang paling bawah. Kelima, mendorong APEKSI Pusat untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan terkait beberapa permasalahan yang dihadapi kota dengan maraknya transportasi *online* serta mencoba mencari solusi yang integratif dan menguntungkan bagi semua pihak. Juga melibatkan usaha *online* dalam pengelolaan pemerintah daerah di berbagai sektor. Keenam, mengusulkan salah satu anggota Komwil III untuk menjadi calon tuan rumah Munas APEKSI tahun 2020, yaitu Kota Tangerang Selatan.

Hasil rekomendasi Komwil III itu akan dibawa ke Rakernas APEKSI XIV di Kota Semarang pada 2-7 Juli 2019 mendatang.

Selain itu, Raker Komwil III, juga mengeluarkan rekomendasi internal. Pertama, untuk mensukseskan kegiatan Rakernas APEKSI di Kota Semarang, meminta seluruh anggota Komwil III bisa hadir, baik sebagai peserta maupun pelaksana Rakernas. Kedua, Komwil III selalu mendorong peran serta aktif seluruh anggota APEKSI Komwil III untuk saling berbagi, berkolaborasi dan bersinergi serta hadir secara aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan APEKSI Pusat maupun Komwil III.

Peserta rapat kerja, juga memutuskan Kota Tangerang sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Wilayah III, APEKSI tahun 2019 yang dilaksanakan bulan November 2019. Juga menetapkan Kota Sukabumi sebagai tuan rumah Musyawarah Komisariat Wilayah III, APEKSI tahun 2020 yang akan dilaksanakan April 2020.

### Bahas Ojek Online

Pada *session sharing*, terkait layanan transportasi *online*, para walikota

mengikuti sangat antusias. Di mana perkotaan menjadi tempat tumbuh subur nya transportasi berbasis *online*. Selain dampak positif, keberadaan ojek *online* perlu dilakukan penataan, untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul.

Acara ini dipandu Walikota Semarang, Hendrar Prihardi dengan penyedia layanan transportasi *online* Gojek. Di mana transportasi *online*, satu sisi menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat, namun juga menimbulkan masalah terjadinya penumpukan mitra atau *driver online*.

Contoh di Kota Bekasi yang dihuni 2,2 juta penduduk, keberadaan ojek *online* yang membantu transportasi masyarakat. Namun, keberadaan ojek *online* banyak yang mangkal di sembarang tempat, yang mengganggu jalur lalu lintas jalan raya. Kondisi ini juga pernah terjadi di Kota Semarang, muncul pertentangan antara ojek konvensional dengan ojek *online* yang tidak boleh mangkal. Pemerintah Kota Semarang mengatasi dengan adanya kerja sama dengan Gojek, membuat tempat mangkal, membuat *shelter* berukuran 200-300 meter.

Di Kota Bogor, persoalan lain juga banyak muncul, keberadaan ojek *online* seakan mengusik keberadaan ojek konvensional. Seolah-olah, lahan ojek konvensional direbut ojek *online*. Sebagai pengelola ojek *online*, perusahaan pengelola aplikasi transportasi *online* tidak memperbolehkan jemput bola. Ini membuat ketidakjelasan SOP, data yang tidak pernah dikirim ke pemerintah kota.


Pihak Gojek pun, mengakui bahwa kesulitan terbesar adalah *shelter*, di sisi yang lain adalah karena mitra Gojek melalui kopi darat (kopdar), menentukan titik *point of interest*, sehingga lebih rapi lalu mengupayakan lahan untuk dibangun. Pendekatan Gojek melalui ojek-ojek pangkalan, agar berminat menjadi mitra Gojek, dengan target permukiman-permukiman. Sisi konvensional lambat laun beralih ke ojek *online* melalui program swadaya, fasilitas kemudahan perumahan, kesehatan. "Ketika *supply* sudah mencukupi, maka *demand* akan ditutup," terangnya.

Di Kota Bandung, ojek *online* semakin berkontribusi terhadap kemacetan, bila kuota sudah mencukupi angka tertentu sedianya ditutup bagi anggota baru mitra ojek *online*. Sebab kota ini jalan kecil-kecil, dan pemerintah kota memiliki kebijakan cabut pentil ban bila melakukan parkir liar. Apa yang dialami Kota Bandung, juga dialami Kota Yogyakarta. Di mana masalah penjemputan dan penurunan penumpang di mall-mall di Yogyakarta sangat mengganggu dan membuat kemacetan.

Pihak Gojek pun memberikan jawaban akan mengupayakan diskusi yang intensif dengan Pemkot Bandung dan Yogyakarta, bagaimana kebijakan pemerintah kota mengatur ojek *online*. Juga pihak Gojek akan terus mencari terobosan untuk mengatur dan mengatasi, baik masalah kemacetan yang ditimbulkan ojek *online*. Terkait *supply* dan *demand* pihak Gojek akan melakukan peninjauan dan perhitungan ulang. Sedangkan terkait pelayanan publik, dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah melalui *go food*.

Sedangkan untuk pembayaran pajak, kerjasama dengan Kota Semarang, akan memudahkan target pendapatan kota, terang Gojek.

Untuk mengatasi kemacetan, Hendrar Prihandi mendorong adanya koordinasi antar *stakeholder* bagaimana mengatasi kemacetan di perkotaan. Pemerintah Kota Depok memberikan ilustrasi, dengan 6 sampai 7 ribu mitra Gojek, terkait kebutuhan sangat berguna bagi masyarakat, terkait kemanfaatan, sebaiknya pemkot lebih proaktif, menjalin kerjasama dengan ojek *online* membangun *shelter* melalui sewa lahan dengan masyarakat. Pemerintah Kota Depok pun berencana membuat perda terkait pengaturannya.

Acara pun dilanjutkan dengan *city tour*, peserta Rakerwil diajak mengunjungi Semarang Bridge Fountain, berupa atraksi air mancur yang dipadukan dengan gemerlapnya lampu warna warni. Peserta juga diajak keliling ke tempat eksotik seperti Sam Poo Kong, Lawangsewu, Taman Srigunting, Nirwana Stable, Semarang Creative Gallery dan Kebun Buah Purwosari. 

# Melaksanakan Pemilu Damai



Raker Komwil V APEKSI di Kota Banjarbaru, 20-22 Maret 2019.

*Pemerintah kota se-wilayah Kalimantan, melakukan raker guna mempersiapkan pemilu damai. Juga menelorkan rekomendasi yang akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional APEKSI di Kota Semarang, 2-7 Juli mendatang.*

**A**PEKSI Komisariat Wilayah V, melangsungkan Rapat Kerja VII di Kota Banjarbaru. Rakerwil yang mengusung tema "Menjaga Stabilitas Politik Menuju Pemilu Damai dan Bermartabat". Kegiatan itu dihadiri sembilan walikota se-Kalimantan, di antaranya Walikota Banjarmasin, Walikota Banjarbaru, Walikota Singkawang, Walikota Pontianak, Walikota Samarinda, Walikota Bontang, Walikota Balikpapan, Walikota Tarakan, dan Walikota Palangka Raya.

Agenda Rakerwil VII yang berlangsung, 20-22 Maret 2019, itu diawali dengan *welcome dinner* yang diisi dengan pengukuhan Forum Komunikasi Perpustakaan Daerah Komwil V APEKSI Regional Kalimantan.

Suasana *welcome dinner* tampak meriah dan akrab, para walikota yang hadir saling menyapa dan kangen karena lama tidak bertemu. Mereka berpakaian batik disambut oleh Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani.

Walikota Banjar Baru, Nadjmi Adhani menyampaikan selamat datang kepada seluruh walikota yang hadir di Kota

Banjarbaru. Kiranya kotanya memberikan kesan tersendiri bagi seluruh peserta yang hadir.

Agenda lain Rakerwil di antaranya diskusi panel, rapat kerja, penanaman pohon di Kebun Raya Banua, perumusan rekomendasi dan *city tour*. Untuk diskusi panel dengan menghadirkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dan ahli arsitektur.


Pada sidang pleno, para walikota yang hadir menyusun rekomendasi strategis dari Komisariat Wilayah V APEKSI Regional Kalimantan yang akan diajukan dalam Rakernas XIV APEKSI tahun 2019 di Kota Semarang.

Setidaknya ada dua rekomendasi terkait dengan Raker dan umum. Untuk rekomendasi terkait dengan tema Raker mencakup. Pertama, mendukung dan menjamin pelaksanaan Pemilu damai dan bermartabat 17 April 2019 dengan menjaga stabilitas politik, peningkatan partisipasi aktif masyarakat serta netralitas Aparatur Sipil Negara. Kedua, menjadikan ajang Pemilu damai dan bermartabat 17 April 2019 sebagai upaya pencerdasan politik masyarakat, melalui: perilaku politik yang santun dan beradab; penyampaian

konten politik yang bebas unsur fitnah dan SARA; pencegahan penyebaran berita bohong (hoax).

Ketiga, peningkatan kesiapsiagaan, komunikasi dan sinergisitas antara elemen penyelenggara pemilu, unsur TNI/Polri, Satpol PP, tokoh masyarakat/agama. Keempat, agar pendelegasian urusan pemerintahan umum kepada daerah disertai dengan pendanaan yang jelas sebagaimana pola pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK). Kelima, peningkatan sosialisasi Pemilu damai oleh penyelenggara Pemilu. Keenam, peningkatan peran pemerintah daerah sebagai pembina dan pemberdayaan sosial politik melalui pemberian dorongan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kehidupan politik masyarakat yang baik.

Sementara rekomendasi umum mencakup. Pertama, meminta pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji dan tunjangan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua, mendorong perbaikan sistem penerimaan CPNS, melalui upaya (a) pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan riil pemerintah daerah, bukan semata-mata berdasarkan kebijakan pusat/nasional. (b) mempertimbangkan/mengutamakan pemenuhan kebutuhan CPNS sesuai formasi yang tersedia daripada mengutamakan faktor *passing grade*.

Ketiga, dalam penerimaan PPPK dan penggajiannya agar pembiayaannya tetap dibebankan pada struktur APBN. Keempat, mendorong pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian terhadap interval kenaikan gaji berkala terkait dengan adanya penambahan batas usia pensiun PNS (dari 56 tahun menjadi 58 tahun atau 58 tahun menjadi 60 tahun) dan besaran kenaikan gaji berkala yang signifikan. Kelima, mendorong kepastian status kelembagaan KORPRI sebagai Lembaga Kedinasan. Keenam, penyempurnaan regulasi operasional terkait kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan berupa Dana Kelurahan. 



# FCM Berminat Kerjasama Dengan APEKSI



Pertemuan Federation Columbianan De Municipions (FCM) dengan APEKSI di Kedutaan Besar Kolombia di Indonesia, Jakarta, 1 April 2019.

*Ternyata, inovasi membangun perkotaan di Indonesia, menarik minat Asosiasi Pemerintah Daerah Kolombia untuk berkolaborasi dengan APEKSI. Mereka menjajaki kerjasama dengan APEKSI pada pertemuan yang berlangsung di Jakarta.*

**S**ejumlah 27 walikota dari Negara Kolombia, yang tergabung dalam Federation Columbianan De Municipions (FCM) atau Asosiasi Pemerintah Daerah Kolombia datang ke Indonesia. Mereka sangat berminat menjalin kerjasama dengan pemerintah kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Pertemuan walikota itu berlangsung di Kedutaan Besar Kolombia di Indonesia, di Jakarta, 1 April 2019.

Dewan Pengurus (DP) APEKSI, Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan), didampingi Wakil Ketua DP APEKSI, Syarif Fasha (Walikota Jambi), Dewan Pengawas APEKSI, Muhammad Idaham (Walikota Binjai), Ketua Komwil

IV, Dewanti Rumpoko (Walikota Batu), Perwakilan Pemerintah Kota Ambon dan Direktur APEKSI, Sri Indah Wibi Nastiti. Mereka diundang untuk memberikan informasi dan potensi peluang pemerintah kota di Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan pemerintahan kota di Kolombia.

Pertemuan itu diawali sambutan dan perkenalan Duta Besar Kolombia Untuk Indonesia, Juan Camilo Valencia Gonzalez. Juan juga memperkenalkan Walikota Kolombia yang hadir beserta potensi daerah yang dimiliki serta kebutuhan kota yang dihadapi. Serta program strategis lainnya dalam membangun perkotaan di Kolombia.

Anggota Federation Columbianan De Municipions (FCM), berharap dari pertemuan ini bisa dilanjutkan kerjasama


strategis yang saling menguntungkan antara Asosiasi Pemerintah Daerah Kolombia dengan Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang tergabung dalam APEKSI.

Ketua DP APEKSI, Airin Rachmi Diany dalam sambutannya memaparkan potensi dan inovasi membangun perkotaan di Indonesia. Melalui APEKSI, pemerintah kota saling belajar, bahkan banyak anggota APEKSI yang mampu menelorkan inovasi tatakelola pemerintahan yang mampu mensejahterakan masyarakat perkotaan. Mereka, terang Airin sangat tertarik dan berkepentingan menjalin kerjasama dengan APEKSI, berbagi pengalaman bagaimana inovasi membangun perkotaan di Indonesia.

Sedangkan Wakil Ketua DP APEKSI, Syarif Fasha menambahkan pertemuan ini sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti kerjasama APEKSI bersama FCM. Ke depan dapat segera diwujudkan kerjasama antar daerah, baik di Indonesia dengan kota di Kolombia, juga antar negara.

Sebagai wadah komunikasi dan kerjasama antar pemerintah kota seluruh Indonesia, APEKSI terus meningkatkan daya saing dan meningkatkan kompetensi inovasi membangun perkotaan. Konsep membangun dengan kolaborasi yang diinisiasi APEKSI menjadi trend di perkotaan, bagaimana inovasi membangun perkotaan cepat menjangar ke daerah lain.

APEKSI terus mendorong anggotanya, membangun perkotaan antar kota bukan untuk saling mematikan, namun berkolaborasi antar kota dan daerah, maju dan mensejahterakan masyarakat perkotaan secara bersama-sama. Perkotaan yang telah maju membantu kota dan daerah lain membangun secara bersama.

Pertemuan itu, akan dilanjutkan untuk menelorkan program, baik seminar, *workshop*, hingga program kerjasama antar perkotaan. 

# Komwil IV: Memperkuat Organisasi APEKSI



Kota Surabaya menjadi tuan rumah Raker Komwil IV APEKSI, 23 Maret 2019.

*Rapat Kerja Komisariat Wilayah IV (Komwil), banyak menyoroti penguatan organisasi APEKSI, agar lebih mampu berkiprah mengemban amanah anggota.*

**A**PEKSI Komwil IV, melangsungkan Raker Komwil ke-15, diikuti 13 walikota dari Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Raker Komwil kali ini mengangkat tema “Penguatan Peran Pemerintah Kota Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota”. Agenda tahunan ini yang mampu mengkonsolidasi dan mengkomunikasikan pembangunan inklusif di daerah perkotaan, khususnya wilayah Indonesia timur. Pemerintah Kota Surabaya menjadi tuan rumah Raker Komwil, yang berlangsung di Hotel JW Marriot, Surabaya, 23 Maret 2019.

Agenda Raker Komwil juga diisi dengan diskusi panel dengan narasumber Plt Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri, Akmal Malik, dan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menyambut peserta Raker Komwil dengan ucapan selamat datang serta menyampaikan terima kasih atas

kepercayaan seluruh anggota APEKSI menjadikan Surabaya sebagai tuan rumah. Risma mengajak peserta bisa bergabung dalam kemeriahan Perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-726. Sebab, Raker Komwil kali ini bertepatan dengan acara ulang tahun Kota Surabaya.

Sebab, ulang tahun Kota Surabaya melibatkan berbagai komunitas dengan potensi dari daerah asalnya. Seperti staf dan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya juga berasal dari berbagai suku di Indonesia. Risma menyebut bagian protokol dari Kupang, humas dari Papua. Perbedaan suku tidak menjadi kendala menjalankan roda pemerintahan di Surabaya. “Kami tidak pernah berbicara suku, agama, yang paling penting adalah meningkatkan kinerja kita,” jelasnya.

Ke depan, Risma menerangkan persaingan bukan lagi antar kota di Indonesia tetapi sudah antar kota di dunia. Era globalisasi 2025 sudah harus diantisipasi dengan mempersiapkan dan meningkatkan potensi agar bisa menang di persaingan global. Di forum itu, Risma

menyampaikan pesan penting bahwa akan menjadi pihak yang merugi bila hari ini sama dengan hari kemarin, juga hari esok sama dengan hari ini.

Anggota Dewan Pengawas APEKSI, Jefirstson Riwu Kore dalam sambutannya menegaskan pemerintah daerah menjadi pilar utama untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik. Untuk itu, dia berharap kepala daerah bisa saling bersinergi dan kolaborasi baik dengan pemerintah se-level, swasta dan masyarakat. “Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus mengutamakan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, pemberdayaan hukum, dan keadilan, efektif,” kata dia.

Jefirstson menambahkan menghadapi persaingan kian ketat daerah bisa mengambil langkah inisiatif, mengarahkan sumber daya untuk meningkatkan daya saing. Yang utama memetakan kemampuan dan kapasitas daerah, menentukan prioritas, sebab daerah selalu menghadapi keterbatasan sumber daya. “Sinkronisasi dan harmonisasi sangat diperlukan,” terangnya.

Selain mendiskusikan masalah perkotaan, Raker Komwil itu juga membuat rekomendasi yang bakal disampaikan di Rakernas APEKSI di Kota Semarang. Beberapa kegiatan yang akan mengisi acara APEKSI di antaranya, penanaman pohon, kunjungan lokasi bagi para pendamping, *welcome dinner*, seminar, dan bergabung dengan acara Surabaya Vaganza.

Yang menarik pada pawai budaya, peserta mengikuti Surabaya Vaganza dengan menaiki mobil willys (Jepp) yang dihiasi dengan bunga. Ini untuk menyambut hari jadi Kota Surabaya ke-726. Mobil ini dinaiki walikota yang diarak keliling Kota Surabaya. Sedangkan di acara *ladies program*, diisi dengan kegiatan belajar berbagai ekonomi kreatif yang telah disiapkan Pemkot Surabaya.



Bagaimana Surabaya mengembangkan ekonomi kreatif yang berada di kawasan Dolly, Kaza, Siola, bagaimana Kota Surabaya menangani anak kebutuhan khusus.

Rekomendasi internal organisasi seperti bidang kepegawaian mendorong percepatan rekrutmen CPNS dan P3K, sebab daerah banyak membutuhkan ASN/Pegawai Baru. Kaji ulang PP 49 Tahun 2018 terkait sistem penggajian P3K yang dibebankan ke APBD, sebab banyak daerah yang terbatas kemampuannya membayar gaji P3K dan menuntaskan rekrutmen K2 melalui P3K, yang penggajiannya dibebankan APBN. Pengangkatan CPNS bagi PTT atau honorer K-2 oleh pemerintah pusat.

Bidang keuangan mencakup pertama, penyusunan regulasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di luar dana yang dikelola langsung pemerintah, seperti dana desa, dana kelurahan, dan dana hibah. Ada standar pengelolaan dan penyusunan tanggung jawab pengelolaan dana tersebut. Kedua, penyampaian juknis pengelolaan dana transfer non DAU agar bisa disampaikan sebelum penyusunan anggaran, guna meminimalisir perubahan anggaran ketika terdapat alokasi anggaran yang tidak sesuai juknis. Ketiga, mendorong percepatan terbitnya peraturan pengganti tentang gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah, kenaikan besaran gaji kepala daerah mengacu pada indikator kinerja masing-masing kepala daerah. Keempat, implementasi PP No.17 Tahun 2018, kiranya ada anggaran khusus kecamatan melalui APBN. Kelima implementasi Permendagri No. 130 Tahun 2018, terkait dana pendampingan disesuaikan dengan kemampuan daerah antara 1-5%. Mengingat kemampuan keuangan dan SDM daerah berbeda.

Bidang kelembagaan pertama, pemerintah pusat diminta meninjau ulang atas indikator untuk pembobotan urusan pemerintahan sesuai PP 18 Tahun 2016. Sebab indikator tidak mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil, khususnya di perkotaan. Kedua, mendorong penguatan kelembagaan APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, objektif dan independen. Ketiga,



Para walikota peserta Raker Komwil IV APEKSI, di Surabaya.

mendorong pemisahan kelembagaan pengelola keuangan, pendapatan dan aset yang selama ini berada di bawah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Dinas Pendapatan untuk meningkatkan penerimaan PAD dan pengawasan wajib pajak serta kemandirian keuangan daerah.

Bidang pemerintahan, mendorong terbitnya regulasi yang mengatur peringkat dan status kinerja laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) secara nasional mulai Januari-Maret mengingat nilai kinerja pemerintahan daerah menjadi salah satu indikator capaian kinerja pemerintah daerah dalam LAKIP yang harus disampaikan ke Gubernur, MenPAN-RB, Mendagri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bidang hukum pertama penguatan peran APEKSI terlibat dalam perumusan kebijakan, perundang-undangan, peraturan yang berdampak pada warga perkotaan dan kinerja pemerintah kota; kedua, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan peraturan di bidang perlindungan hukum penyelenggaraan pemerintah daerah atau institusi negara, baik penegak hukum maupun pengawas keuangan negara dan daerah.

Sedangkan rekomendasi eksternal mencakup pertama, pengembangan kelangsungan organisasi melalui inovasi

bentuk program dan kegiatan (kerjasama dengan pihak swasta, pelayanan pelatihan dan konsultasi). Kedua, pengembangan potensi daerah dalam segala bidang sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tawar pemerintah daerah. Termasuk pula penguatan jaringan kerja yang saling menguntungkan antar pemerintah daerah; ketiga, penguatan peran negosiasi APEKSI terhadap pemerintah; keempat peran APEKSI dalam mendorong pemerintah untuk mempermudah kerjasama luar negeri dengan cara merubah peraturan perundang-undangan yang ada. Kelima, mendorong, memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada Komwil IV APEKSI khususnya kesekretariatan sehingga peran Komwil dapat berfungsi secara optimal sebagai kepanjangan tangan dari Sekretariat Nasional APEKSI. Keenam, mendorong APEKSI untuk memberikan kontribusi dukungan iuran dana kepada Komwil APEKSI untuk penyelenggaraan kegiatan sekretariat dan rapat kerja Komwil. Rekomendasi itu ditetapkan 23 Maret 2019 di Surabaya.

Raker Komwil juga memutuskan Kota Probolinggo menjadi tuan rumah Raker Komwil XVI tahun 2020 dengan cadangan Kota Blitar. Agenda yang berlangsung mulai 22-24 Maret 2019, juga penyusunan program kerja APEKSI Wilayah IV tahun 2020. **K**

# Belajar Dari *Best Practice* Perkotaan



Walikota Depok, Mohammad Idris, memaparkan tata kelola persampahan di Kota Depok, dengan menggunakan Black Soldier Flies (BSF)/maggot.

*Banyak hal menarik bisa dimanfaatkan pemerintah kota menggali potensi best practice dari pemerintah kota lain. Minimal Buku Best Practice yang diluncurkan APEKSI sebagai sarana pembelajaran yang mudah dan murah.*

**A** cara Raker Komwil III, juga dibarengi dengan *launching* Buku *Best Practice* dan *sharing* Program Smart City dari berbagai kota. Seperti Pemerintah Kota Depok, sampah organik dari Kota Depok, Pemerintah Kota Jogjakarta dengan *Jogja Smart Service*, Pemerintah Kota Bandung dengan *Mini Lab Food Security*.

## Urai Sampah Pakai Lalat Hitam

Pemerintah Kota Depok mengawali mengolah sampah organik memakai maggot dilakukan empat tahun lalu. Selama ini mengolah sampah banyak dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi. Pemerintah Kota Depok justru mengolah sampah dengan cara organik. Hal itu terbukti lebih efektif, efisien, dan berbiaya murah serta memberikan keuntungan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kota Depok

memanfaatkan maggot untuk mengelola sampah. Maggot sejenis larva atau belatung yang berasal dari lalat hitam (*black soldier fly*) yang dibudidayakan.

Cara pengolahan sampah diurai oleh maggot. Sampah basah sampai di Unit Pengolahan Sampah (UPS) dipilah berdasarkan kategorinya masing-masing. Sampah organik yang telah dipisahkan ini dijadikan makanan maggot. Maggot sangat rakus dalam memangsa sampah organik ini. Apapun dimakan tanpa menyisakan, mulai dari sampah buah sampai tulang ayam. Dari telur lalat hitam itulah yang bisa dijual untuk makanan ternak.

Atas inovasi itu, Pemerintah Kota Depok berhasil mengukir prestasi. Karya dan inovasi sampah organik ini menjadi *best practice* yang akan dibukukan APEKSI bersama empat kota lainnya.

Walikota Depok Mohammad Idris, dalam pemaparan pada *launching* buku *Best Practice Kota-Kota di Indonesia Jilid XIII* di Kota Semarang mengatakan mereduksi

sampah organik dengan menggunakan maggot. Di mana kota ini setiap harinya menghasilkan 1.300 ton sampah. Di mana 63% sampah rumah tangga dan sisanya berasal dari kawasan, fasilitas publik dan pusat perniagaan.

Awalnya, terang Idris, 40% sampah yang dihasilkan adalah sisa makanan. Dengan menggunakan metode urai lalat hitam, dalam waktu 3 hari, lalat itu bisa bertelur 300-500 telur. Dari larva akan bertelur dan setelah beberapa hari setelah bertelur mati. Ini akan bercampur dengan sampah organik, menjadi maggot. Maggot ini dijual untuk makanan ikan hias.

Untuk mendorong masyarakat Depok mengolah sampah organik, pemerintah kota memberikan program partai ember ke masyarakat. Di mana sampah organik dimasukkan ember lalu diangkut mobil sampah organik, menuju pengolahan dan produksi maggot. Hasilnya dijual ke PLN dan produksi kompos.

## Jogja Smart Service

Pemerintah Kota Jogjakarta, *best practice* yang dibukukan APEKSI terkait dengan *Jogja Smart Service* (JSS). Aplikasi yang berbasis *Single Window* dan *Single Sign In*, untuk meningkatkan layanan di tengah masyarakat. Dengan begitu masyarakat Jogjakarta cukup *login* menggunakan nomor NIK untuk mengakses seluruh layanan yang disediakan Pemerintah Kota Jogjakarta. Meski demikian, aplikasi JSS ini bukan cuma untuk warga Kota Jogjakarta. Turis dan wisatawan yang mengunjungi Jogjakarta pun bisa mengunduh aplikasi ini untuk mendapatkan informasi lengkap tentang Kota Jogjakarta.

Wakil Walikota Jogjakarta, Heroe Poerwadi, dalam presentasi saat *launching best practice* mengatakan masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik melalui aplikasi ini. Berawal dari mengintegrasikan data, maka dibuat JSS. Jogja mempunyai SOP, 2 jam harus ada respon, dan 2 hari sudah diselesaikan. "OPD terkait segera merespon akan mendapatkan notifikasi," terangnya.

Ini menjadi bagian penting, OPD bisa





Ketua DP APEKSI Airin Rachmi Diany bersama para walikota anggota APEKSI saat launching buku *Best Practice Kota-Kota di Indonesia Jilid XIII*.

bereaksi cepat melayani masyarakat. Contoh, untuk urusan kedaruratan melalui ambulan, yang terpenting dari JSS, membuat satgas. Dari pengalaman Jogja terkait sarpras fisik, lampu mati, bahkan jalan berlobang kecil difoto dan di-upload, akan segera direspon. "Ini membuat anggaran fisik tahun lalu membengkak. Awalnya dari operator menawarkan layanan aplikasi karena Jogja punya tim kreatif, hasilnya banyak aplikasi yang tidak terintegrasi," terangnya.

Untuk mengintegrasikan, Heroe Poerwadi mengakui menghadapi kesulitan mengintegrasikan dengan pemerintah pusat, OSS juga susah diintegrasikan. Sebenarnya untuk perijinan sudah ada aplikasi, dan Jogja juga berusaha menggaet dengan instansi vertikal lainnya seperti Halo Polisi, karena aduan di pemkot juga merupakan bagian dari pemerintah pusat. Terkait urusan perkawinan dan perceraian, misalnya aplikasi ini belum terintegrasi dengan Kantor Kementerian Agama dengan belum terintegrasi dengan Dukcapil.

### Memastikan Jajanan Pasar Aman

Kota Bandung tergolong tingkat konsumsinya tinggi dan selalu memastikan pengawasan dan pemeriksaan pangan secara intensif. Ini untuk memberikan kepastian rasa aman masyarakat dalam memilih bahan pangan yang dikonsumsi.

Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana saat presentasi pada *launching* buku *Best*

*Pratice Kota-Kota di Indonesia Jilid XIII* mengatakan 80% bahan pangan segar di kota ini mengandalkan pasokan dari daerah sekitar. Pemerintah kota selalu memastikan keamanan pangan segar dapat dikonsumsi warga Kota Bandung.


Untuk memastikan itu, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung membuat Inovasi *Mini Lab Food Security* di pasar modern dan pasar tradisional untuk memfilter pangan yang akan dibeli konsumen sehingga terjaga kualitasnya.

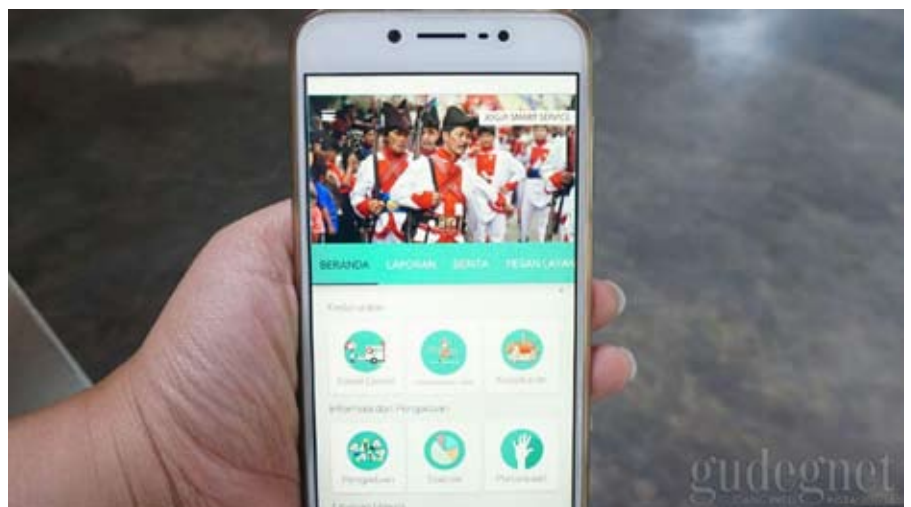
Melalui lab itu bahan pangan di pasar modern dan 36 pasar tradisional bisa dijamin keamanannya. Sarana ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui kandungan dalam bahan makanan. Waktu yang dibutuhkan cukup

singkat, satu menit untuk mengetahui kandungan pangan.

Kota Bandung menjadi daerah pemasaran produk pangan, 80% bahan pangan berasal dari luar Kota Bandung. Ini membutuhkan pengawasan yang intensif memastikan dan memberi perlindungan kepada masyarakat. Mini lab merupakan tempat pemeriksaan percobaan dan pelatihan dengan mempergunakan peralatan dan bahan kimia untuk menguji keamanan pangan segar seperti daging, susu, telur, beras, ikan, sayuran dan buah-buahan dengan skala kecil dan pemeriksaan yang sederhana dan cepat.

Mini Lab Security menggunakan tes cepat, mulai uji klorin (pemutih) pada beras, residu pestisida pada sayuran dan buah, *durante test* (uji ayam bangkai) pada ayam, halal test (*pork detection kit*) pada daging sapi, *perokside test* pada kulit dan bagian lain dari sapi, *borax test* pada daging dan ikan, *formaline test* pada ikan dan buah. "Intinya bekerja sama dengan pasar tradisional maupun modern, agar bahan pangan segar yang disuplai ke kota Bandung aman dikonsumsi warga Kota Bandung," terang Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana.

Bahkan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung, dengan *Mini Lab Food Security* ini, mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya, Abdi Bakti Tani Tahun 2018 dari Kementerian Pertanian dan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 dari Kementerian PAN-RB. 



Aplikasi Jogja Smart Service (JSS), salah satu terobosan Pemkot Yogyakarta.

# Rakernas XIV APEKSI 2019, Bakal Meriah



Walikota Semarang Hendrar Prihadi dan Ketua DP APEKSI Airin Rachmi Diany bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

*Dewan Pengurus APEKSI, melaunching Indonesia City Expo (ICE), untuk memeriahkan gelaran tahunan Rakernas APEKSI XIV di Kota Semarang.*

Indonesia City Expo (ICE), di-launching berbarengan dengan Rapat Kerja Komisariat Wilayah III, yang berlangsung di Hotel PO, Kota Semarang, 29 Maret 2019 lalu. ICE merupakan bagian dari rangkaian acara Rapat Kerja Nasional APEKSI XIV Tahun 2019, yang bakal digelar di Kota Semarang pada 2-7 Juli 2019.

Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kota Semarang juga menggelar Gebyar

UMKM ICE I Tahun 2019. Kegiatan launching ICE ini untuk memberikan warning ke pemerintah kota agar segera mempersiapkan diri mengikuti gelaran Rakernas, mempersiapkan ICE yang bakal diikuti.

Mulai dari pawai budaya nusantara, pageralan seni musik dan budaya nusantara, city tour, gebyar produk UMKM, talk & fashion show, hingga Semarang Night Carnival. Di ajang Indonesia City

Expo (ICE), merupakan kesempatan bagi pemerintah kota mempromosikan keunggulan potensi yang dimiliki kota anggota APEKSI.

Pelaksanaan ICE dan Gebyar UMKM dipusatkan di Lapangan Simpang Lima. Lapangan ini biasa disebut Lapangan Pancasila, yang dikelilingi 5 jalan yang menyatu yaitu Jalan Pahlawan, Pandanaran, Ahmad Yani, Gajah Mada dan Ahmad Dahlan. Kawasan Simpang Lima menjadi ikon Kota Semarang dan menjadi pusat aktifitas sekaligus rekreasi masyarakat baik pagi maupun malam hari.

Lapangan Simpang Lima pada malam hari menjadi sangat menarik dan luar biasa, masyarakat tumpah ruah di kawasan ini dengan berbagai aktifitasnya ada yang sekadar menikmati keindahan dan gemerlapnya lampu di kawasan ini, ada yang menikmati kuliner di sepanjang trotoar yang mengapit kawasan simpang lima, ada yang menikmati berbagai permainan pula, atau sekadar kongkow bersama sahabat dan keluarga.

Pelaksanaan Rakernas XIV, bakal digelar di Hotel PO, Kota Semarang, 3-4 Juli 2019. Sedangkan gebyar UMKM ICE I dan Indonesia City Expo (ICE) XVII digelar dari 3-6 Juli 2019 di Lapangan Simpang Lima. Di Simpang Lima ini ada panggung utama ICE, berukuran 8 x 15 meter, yang dilengkapi dengan backdrop, screen monitor, lighting, sound system, hall audiens dan kursi audiens.

Selain ICE, kegiatan ini untuk meningkatkan performance dan promosi seni budaya, adalah Pawai Budaya Nusantara dan Semarang Night Carnival. Kegiatan ini berlangsung 3 Juli 2019 dari pukul 19.00-22.00 WIB. Kegiatan Pawai Budaya ini dimulai dari Paragon Shopping Mall dan berakhir di depan tugu muda, ujung Jalan Pemuda, depan balai kota disediakan panggung utama. Kegiatan ini akan diisi tim kesenian



dan promosi budaya wakil pemerintah kota se-Indonesia, juga dari Pemerintah Kota Semarang. Tari daerah yang akan ditampilkan mulai dari Tari Pepe-Pepe ri Makka dari Sulawesi Selatan, Tari Bedhaya Ketawang dari Jawa Tengah, Tari Pedang Muallang dari Kalimantan Barat, Tari Saman dari Aceh dan lainnya.

Sedangkan acara *fashion show* batik khas Jawa Tengah, juga melengkapi Rakernas XIV APEKSI, yang berlangsung 2-6 Juli 2019, dari pukul 20.00-21.00 WIB, di Panggung Utama ICE 2019 (Lapangan Simpang Lima Kota Semarang). Acara ini dimeriahkan peserta dari Pemerintah Kota se-Indonesia (Peserta ICE XVII).

Selain kegiatan itu banyak hiburan yang menarik yang mengedukasi. Di antaranya *city tour* yang berlangsung 3 Juli 2019, dari 13.30-14.30. Rute dan tujuan *city tour* mulai dari Lawang Sewu, Tugu Muda, Taman Srigunting Kota Lama, Kampung Pelangi, Sampookong. Kegiatan itu berhenti di lokasi ICE, Lapangan Simpang Lima, yang diikuti peserta ICE XVII. Sedangkan penanaman pohon khas daerah, dilakukan 4 Juli 2019, yang berlangsung pukul 06.30-08.00. Penanaman pohon dilakukan di Hutan Wisata Tinjomoyo, yang diikuti semua walikota se-Indonesia. Lalu *ladies program*, dilakukan 3 Juli 2019, pukul 08.30-14.00, di kawasan Kota Lama, yang diikuti Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota se-Indonesia.

Ada juga hiburan dan *talkshow*, yang berlangsung di Media Center ICE Lapangan Simpang Lima. Acara ini berlangsung 5 Juli 2019, pukul 16.00-17.30, tema yang diusung "Mendorong Daya Saing Daerah melalui Inovasi Pembiayaan Infrastruktur dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Talkshow ini menghadirkan pembicara Ketua Umum DP APEKSI, Walikota Semarang, Direksi BUMN dan Perusahaan Swasta, serta Pimpinan Media Cetak dan Elektronik.

Sedangkan ICE yang berlangsung di Lapangan Simpang Lima Semarang, diikuti Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Kantor Kementerian/Non Kementerian, Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-



Suasana Simpang Lima Semarang saat malam.

Indonesia, Perusahaan Swasta Nasional dan Multi Nasional, Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, BUMN/D, Koperasi dan UMKM.

Produk dan atau jasa yang ditampilkan mulai dari hasil capaian pembangunan daerah, seperti produk ekonomi dan industri kreatif, *smart city* yang menjadi fokus daerah, peluang dan potensi investasi di daerah, dan produk unggulan daerah.


Sedangkan Gebyar UMKM untuk mewadahi pengembangan UMKM di Kota Semarang. UMKM ini hasil binaan Pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi angka pengangguran di kota ini. Pemkot mendorong penciptaan lapangan kerja, pengembangan wirausaha, maupun pengusaha pemula. Banyak UKM di kota ini yang memiliki inovasi pengembangan produk yang disesuaikan dengan kekinian.

Menjadi wirausaha, calon pengusaha dimulai dari bawah diawali dengan berjualan tanpa modal namun bisa dengan jualan konsep, jualan diferensiasi dan jualan ide yang bisa menghasilkan lapangan pekerjaan. Setelah siap dengan ide barulah mengembangkan dengan sarana teknologi informasi, dan ditambah dengan kreatifitas, konsep yang jelas dan

keberanian.

Masalah yang sering dihadapi UKM adalah permodalan dan pemasaran. Permodalan mendapat bantuan dari pemkot dengan kredit wibawa, sedangkan pemasaran UKM diharapkan mengembangkan dengan cara-cara terkini. UKM yang dinilai berhasil, diikutkan meramaikan Rakenas APEKSI XIV di Kota Semarang.

Dari keikutsertaan pemerintah kota baik dalam ICE maupun Rakenas APEKSI XIV, panitia juga akan memilih pemilik stand pameran terbaik. Setidaknya ada tiga kategori yang diperebutkan peserta, yaitu kategori stand pemerintah kota anggota APEKSI, stand pemerintah provinsi, juga stand non pemerintah. Penilaian akan mencakup aspek *performance stand*, materi yang ditampilkan produk/jasa, hingga jumlah pengunjung dan transaksi yang terjadi di stand. Sedangkan, penilaian ini dilakukan tim juri yang diisi oleh unsur akademisi, unsur pers/media, juga unsur event organizer.

Kegiatan ini juga akan membagi-bagi *doorprize* yang digelar di akhir semua acara atau akhir rangkaian penutupan ICE XVII Tahun 2019. *Doorprize* ini diberikan ke pengunjung ICE, yang akan diundi. 

# Serba Gratis di Kota Gorontalo



Warga menunjukkan kartu Keluarga Sejahtera usai peluncuran Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo.

*Walikota Gorontalo, Marten A. Taha menjamin gratis kehidupan masyarakatnya mulai lahir hingga pulang ke liang lahat. Marten A. Taha pun meluncurkan Kartu Sejahtera dan Tancap Nikah. Pelaku usaha kecil yang suka pinjam bank keliling pun disaluri modal dari zakat profesi.*

**M**asyarakat Gorontalo bisa bernafas lega, tidak harus memikul berat beban kehidupan ini. Setelah walikota meluncurkan program Kartu Sejahtera, kehidupan masyarakat Gorontalo semakin produktif. Sakit ditanggung pemkot, *nggak* punya modal disaluri zakat profesi. Mau sekolah gratis, mau usaha ijin gratis, mau nikah dapat surat tanpa bayar, bahkan pemeriksaan medis gratis sebelum menikah.

Itulah sederet prestasi Walikota Gorontalo, Marten A. Taha. Sejak dipercaya menduduki orang nomor satu di Kota Gorontalo, Marten tidak berleha-leha.

Sejalan waktu, banyak program yang ditelurkan untuk membangun Kota Gorontalo lebih sejahtera. Langkah pertama mengkonsolidasikan program Gorontalo *Smart City* – menjadi Gorontalo Kota Pintar. Dalam hitungan hari konsep kota pintar pun ditetapkan. Memang sangat berasalan, *trend* pembangunan Kota Pintar meletakkan dasar pembangunan bervisi jangka pendek sekaligus panjang.

Tahun 2015 Pemkot Gorontalo meluncurkan Kartu Sejahtera. Sebab, kesejahteraan menjadi hal yang penting dalam pembangunan mencapai kehidupan yang sejahtera. Hal ini sejalan dengan konsep, *The Wealth of Nations* yang ditulis pakar ekonomi dunia, Adam

Smith, bahwa kemakmuran sebuah negara terjadi jika semua kebutuhan dan fasilitas untuk hidup tersedia dengan harga murah.

Sebagai kepanjangan tangan layanan publik, Marten Taha menerjemahkan kemakmuran seperti diurai Adam Smith dalam bentuk jaminan sosial, yang diwadahi Kartu Sejahtera.

Kartu Sejahtera sebagai jaminan “gratis dari lahir sampai ke liang lahat (mati)” sesuai janji politik masa kampanye. Yang mencakup gratis antara lain *pertama*, gratis biaya persalinan/kelahiran, *kedua*, gratis biaya akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), *ketiga*, gratis biaya kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit. *Keempat*, gratis biaya pendidikan (SD-SMA). *Kelima*, gratis bantuan usaha mikro dan kecil. *Keenam*, gratis biaya izin usaha. *Ketujuh*, gratis biaya akta nikah, dan *delapan* gratis biaya *ambulance* dan pemakaman.

Penerima Kartu Sejahtera adalah mereka yang tergolong papa (miskin) atau penerima beras miskin (raskin). Kriteria penerima Kartu Sejahtera adalah masyarakat yang tergolong miskin dilihat dari daftar penerima Beras Miskin (Raskin) yang ditetapkan Kementerian Sosial RI, di Kota Gorontalo tersebar di 9 kecamatan di 50 kelurahan.

Data itu dilakukan verifikasi oleh tim Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari dua orang setiap kelurahan dengan terjun langsung mengamati kondisi di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi, karena tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian besar masyarakat akan memosisikan diri sebagai keluarga miskin. Data yang didapatkan berupa Rumah Tangga Sasaran (RTS) pemegang Kartu Sejahtera oleh tim Pokja dilakukan peng-*input*-an dan penyusunan *data base*. Untuk mempermudah proses administrasi, Pemerintah Kota Gorontalo bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) salah satunya dengan pembuatan aplikasi pelayanan.



Kartu Sejahtera ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 Kota Gorontalo. Dasar pelaksanaan program diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Unggulan Kartu Sejahtera beserta Petunjuk Teknis Layanan Kartu Sejahtera.

Program inilah yang membawa Walikota Gorontalo, Marten A Taha memperoleh penghargaan *Indonesia Social Responsibility Award* 2014, sebagai daerah yang mampu melaksanakan program gratis dari lahir hingga mati. Paling tidak ini menjadi *goodwill* pemerintah kota sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, maju dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Tidak hanya itu, Pemkot Gorontalo di bawah kepemimpinan Marten A Taha, 8 Juli 2017 meluncurkan program Tancap Nikah untuk generasi unggul (Tancap Nikah) atau tanda aman calon pengantin. Ini sebagai respon dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo menyikapi berbagai isu penyakit yang menyerang keluarga baru pasca menikah.

Gerakan Tancap Nikah, inovasi yang diajukan Dinas Kesehatan menyikapi maraknya kasus kematian ibu dan anak, serta adanya gejala *stunting* di kota Gorontalo. Itu sebagai dasar merumuskan program yang menyentuh fondasi ketiga masalah. Program disambut Walikota Gorontalo, Marten Taha, sebagai ide cemerlang merespon masalah kesehatan akhir-akhir ini.

Program ini juga *in-line* dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya mengurangi angka kematian ibu dan anak digagas sebagai program yang dikerjasamakan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.

Program ini untuk menyiapkan calon pengantin, khususnya calon mempelai perempuan sehat dan layak hamil, dan mencegah gagal tumbuh bagi janin kelak. Selain layanan kesehatan dasar, calon pengantin diberikan pemeriksaan anemia, golongan darah, HIV AIDS, diabetes dan Hepatitis B. Baik calon pengantin laki-laki

maupun perempuan, keduanya diberikan tindakan penyuluhan tentang kesehatan, tindakan sesuai diagnosa penyakit apa yang sedang diidap, termasuk suntikan tetanus bagi pihak perempuan.

Melalui identifikasi ini, keadaan yang darurat dari setiap calon ibu dapat diatasi sesegera mungkin, memudahkan medis mengambil tindakan jika diperlukan saat persalinan. Seluruh data dari calon pengantin dijamin kerahasiaannya.

Sejak diuncurkan hingga kini, program ini dimanfaatkan sekitar 2.296 pasangan calon pengantin. Program ini berlaku bagi semua pasangan calon pengantin yang mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Meskipun salah satu pasangan tidak ber KTP Gorontalo, namun selama akan tercatat pada KUA dan Disdukcapil Kota Gorontalo, maka akan tetap dilayani secara gratis sampai penerimaan sertifikat. Setelah calon pengantin mendapatkan sertifikat sehat secara medis, sebagai bekal menuju pernikahan ke KUA.

Program Tancap Nikah diperkuat dengan Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Layanan Paripurna Tanda Aman Calon Pengantin yang akan Menikah di Gorontalo.

Memastikan kehidupan bagi perempuan dan anak yang dilahirkan bukanlah sebatas capaian RPJMD. Namun program ini komitmen awal menjamin keberlangsungan kehidupan bagi setiap generasi unggul yang dijaga sedari dalam kandungan ibunya. Ke depannya, program ini mampu menurunkan angka kematian ibu dan anak saat persalinan dan juga mencegah *stunting* secara optimal melalui jaminan kesehatan sejak semula.

### **Menggali Zakat Profesi**

Untuk melengkapi layanan publik, Marten Taha mengoptimalkan pengumpulan zakat di lingkungan Pemkot Gorontalo. Di awal kepemimpinannya, dia mencermati jumlah penerima zakat lebih besar dari pembayar zakat. Khusus di kalangan ASN di Pemkot Gorontalo belum optimal membayar zakat.


Tahun 2017, Marten Taha merombak kepengurusan Badan Zakat Daerah

(Bazda) untuk mengoptimalkan penarikan zakat profesi di lingkungan Pemkot Gorontalo. Penarikan awalnya dilakukan secara manual, setiap bendahara OPD manarik orang per orang untuk membayar zakat. Kini penarikan zakat profesi, mulai 2018 sudah memakai aplikasi penyetoran zakat non tunai. ASN yang berpenghasilan Rp 3,5 juta ke atas wajib membayar zakat profesi.

Penyaluran zakat dilakukan setiap bulan, yang membuat saldo di Baznas tidak pernah menumpuk. Penyaluran yang terencana kepada yang berhak menerima yang ditetapkan rapat pengelola zakat. Bentuk penyaluran zakat seperti untuk meningkatkan ekonomi produktif, pemberian bantuan sarana kehidupan, ada juga penyaluran tunai yang jumlahnya sangat minim.

Contoh, penyaluran zakat untuk ekonomi produktif, sebesar Rp 5 juta untuk pengembangan warung disalurkan secara bertahap. Tahap pertama Rp 3 juta berupa bantuan barang dagangan. Selama tiga bulan warung tersebut dimonitor perkembangan penjualannya. Jika berkembang tahap berikutnya ditambah modal Rp 2 juta menambah *stock* dagangan. Tidak semua pemilik warung bisa mendapat penyaluran zakat ini. Baznas melakukan seleksi jika benar mengalami kesulitan permodalan dan tidak memiliki hutang ke pihak lain, baru diberikan penyaluran zakat.

Untuk bantuan tunai diberikan sebesar Rp 500 ribu, kepada penjaja makanan keliling seperti penjual nasi kuning, penjual es atau omset dagangan yang didapat setiap hari. Mekanisme seleksi dan penyaluran zakat ini dipandang lebih efektif dan langsung bisa dirasakan manfaatnya bagi si penerima.

Awal pengumpulan zakat, 2017 mencapai Rp 125 juta, setelah walikota mengeluarkan surat edaran Oktober 2018 kewajiban membayar zakat profesi, penerimaan zakat pada Februari 2019 mencapai Rp 250 juta. Memang inilah kepedulian Pemerintah Kota Gorontalo terhadap peningkatan penerimaan zakat profesi untuk membantu sesama. ASN di lingkungan pemkot pun diwajibkan membayar zakat 2.5% dari jumlah penghasilannya. 





Turut mengundang Kota & Kabupaten se Indonesia dan Mengundang Kedutaan Besar Negara Anggota Asia Africa Sister City Juga Negara Sahabat beserta Para Delegasi kesenian (Info lebih lanjut CP: +6281299885958 DISBUDPAR KOTA BANDUNG)



# TOP 10 INDONESIA WONDERFUL EVENT

# Asia Africa Festival



**RANGKAIAN ACARA 18 MEI 2019 - 30 JUNI 2019  
MAIN EVENT DAN BIG BANG 29 JUNI 2019**



## ASIA AFRIKA RAMADHAN FAIR NGAOS (NGABUBURIT ON THE STREET)

Jl. Braga Pendek - Jl. Sukarno & CRS  
14 JUNI 2019 - 16 JUNI 2019 & 21 JUNI 2019 - 23 JUNI 2019



## ROAD TO ASIA AFRICA FEST

PUSAT PERBELANJAAN - GEDUNG KESENIAN - DESTINASI OUTDOOR  
14 JUNI 2019 - 16 JUNI 2019 & 21 JUNI 2019 - 23 JUNI 2019

ASIA AFRICA X-PO  
ASIA AFRICA GEOGRAPHIC & FOODMARKET

## BIG EVENT ASIA AFRICA FEST

Jl. Asia Afrika - Gedung Merdeka - Jl. Sukarno & CRS

ASIA AFRIKA CARNIVAL  
NATIONAL FLAG RAISING CEREMONY

ART & CULTURE SHOW







ASOSIASI PEMERINTAH KOTA  
SELURUH INDONESIA



PEMERINTAH KOTA  
SEMARANG

main organizer



co organizer



# Indonesia City Expo XVII

## RAKERNAS APEKSI XIV



**3-6 Juli 2019**

**Simpang Lima**

Semarang, Jawa Tengah

- Kuliner Khas Semarang
- City Tour
- Gebyar Produk UMKM
- Talk & Fashion Show
- Pawai Budaya Nusantara
- Pagelaran Seni, Musik & Budaya Nusantara
- Semarang Night Carnival

6<sup>th</sup> INDONESIA INTERNATIONAL MODERN CLEANING EXHIBITION  
**EXPO 2019 CLEAN**

Co-located with :

EXPO 2019 **LAUNDRY** EXPO 2019 **BOILER**

**11 - 13 Juli 2019**  
Jakarta International Expo



PAMERAN KHUSUS BAGI INDUSTRI CLEANING – EXPO CLEAN  
menghadirkan berbagai teknologi, produk dan solusi bagi pemeliharaan kebersihan kota

***Kota yang bersih merupakan prestasi bagi warga dan pemerintah kotanya***

Didukung oleh :



SEMINAR APEKSI di EXPO CLEAN 2019  
**“Kebijakan Strategi Daerah Dalam Mewujudkan Kota Bersih”**  
11 Juli 2019

Informasi & Pendaftaran hubungi : Imam Yulianto – 0812 9859529 | imam@apeksi.or.id

Organised by



T : +62 21 5835 4654  
F : +62 21 5830 1097  
E : info@mediaarthasentosa.com

[f expocleanind](#) [t expocleanind](#) [i expocleanind](#) [in expo clean expo laundry](#)

[www.expo-clean.com](http://www.expo-clean.com)